

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

Rakyat Merdeka Group

OKNUM DIDUGA PICU PT PWI 6 HENGKANG

LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, menilai henggangnya PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 dari Kecamatan Rangkasbitung tidak bisa hanya dilihat dari berakhirnya kontrak gedung. Ia menduga, ada faktor lain yang turut memengaruhi keputusan perusahaan manufaktur alas kaki tersebut meninggalkan Kabupaten Lebak.

Hasbi mengatakan, persoalan yang berkaitan dengan iklim investasi perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut dia, berakhirnya kontrak gedung yang disebut menjadi alasan perusahaan tidak melanjutkan operasional bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan.

“Sebagai kepala daerah, saya minta ini jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Kalau di media kan disebutkan bahwa tidak diperpanjang kontraknya, nah tidak bisa dipandang aspek itu aja,” kata Hasbi se usai menghadiri pembukaan Nobu Bank di Jalan RT Hardiwinangun, Rangkasbitung,

BACA OKNUM HAL - 9

Dua Proyek Huntap Sumur Disorot

PANDEGLANG, BANPOS – Pemasangan saluran beton pracetak berbentuk U atau U-Ditch pada dua proyek pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap (huntap) di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan di lapangan, U-Ditch pada kedua proyek tersebut dipasang tanpa terlihat menggunakan pasir urug maupun lantai kerja sebagai lapisan dasar.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pemasangan dengan spesifikasi teknis dan desain konstruksi yang telah ditetapkan. Terlebih, kedua lokasi berada tidak jauh dari kawasan pantai se-

hingga kondisi tanah dasar perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk terkait daya dukung dan potensi penurunan.

Selain tidak menggunakan pasir urug, pada ujung drainase dari dari kedua proyek tersebut tidak tersambung dengan saluran drainase pembuang, atau buntu. Pada drainase Huntap Desa Tunggal Jaya, drainase terlihat terputus tepat disamping warung. “Yah paling nanti airnya tumpah semua ke depan sini (warung),” ucap salah seorang warga, saat dimintai pendapatnya oleh BANPOS terkait keberadaan drainase tersebut.

Dua pekerjaan tersebut dianggarkan

BACA DUA PROYEK HAL - 9



STEFANO/BANTEN POS

Saluran beton pracetak berbentuk U atau U-Ditch pada dua proyek pembangunan infrastruktur penunjang hunian tetap (huntap) di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

BACA PESERTA HAL - 9

SERANG, BANPOS – Keluhan peserta BPJS Kesehatan yang merasa menerima obat tidak lengkap dan menilai pengobatan tidak memberikan hasil sesuai harapan menjadi alarm bagi penyelenggara jaminan kesehatan. Persoalannya bukan semata-mata soal obat,

PESERTA BPJS JANGAN DIPAKSA ‘BAYAR DUA KALI’

Vox Populi



Dedi Rustandi
REDAKTUR BANTEN POS

THM dan Janji Kapolri

TEMPAT Hiburan Malam (THM) memang menjadi salah satu titik paling rawan dalam pusaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Stigma bahwa THM “tidak bisa lepas” dari narkoba terus diperkuat oleh intensitas razia kepolisian

BACA VOX POPULI HAL - 9



DZIKI OKTOMALIYADI/BANTEN POS

PELANTIKAN PPPK. Foto udara ribuan PPPK Kota Serang tengah dilakukan pelantikan di Alun-alun Barat, Kota Serang beberapa waktu yang lalu.

Pelajar Banten Juara 3 di Senkaido International Open

Oleh : **Muhamad Wahyu**

PRESTASI membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Banten di kancah internasional. Tubagus Arya Wira-

samara Alfarizi, siswa Kelas 9 Putra 1 SMP Al-Qudwah, berhasil meraih Juara 3 pada Kejuaraan Senkaido International Open ke-8 Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

BACA PELAJAR HAL - 9



ISTIMEWA/BANTEN POS

PGRI MINTA PEMKOT SGERA MEMBAYAR GAJI GURU PPPK PARUH WAKTU TERTUNDA DUA BULAN

CILEGON, BANPOS - Keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan membuat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kota Cilegon resah. Persatuan Guru Republik

BACA GAJI HAL - 9

BATAS PANDEGLANG-LEBAK DIVERIFIKASI, KESEPAKATAN DIUSULKAN KE KEMENDAGRI

03

TERDAKWA KASUS PENIPUAN UMRAH DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA

04

GUBERNUR ‘WARNING’ PENGEMBANG

07

TOLAK SEKDES PENGGUNA NARKOBA

08



TERVERIFIKASI DEWAN PERS

BANPOS CHANNEL

WWW.BANPOS.CO

BANTENPOS@GMAIL.COM

BANTEN_POS

BANTEN POS

HARGA ECERAN
RP 4.000

Polres Cilegon Ungkap 105 Kasus Narkoba, Kos Jadi Perhatian

CILEGON, BANPOS – Polres Cilegon mengungkap 105 kasus narkoba selama Januari hingga Oktober 2026. Sabu-sabu mendominasi dengan 61 kasus dan barang bukti seberat 1.288 gram, sementara rumah kos menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena diduga digunakan untuk menyimpan narkoba sebelum diedarkan.

KBO Satresnarkoba Polres Cilegon IPTU Nasdian mengatakan, pengungkapan tersebut meliputi kasus narkoba, psikotropika, dan obat-obatan. Selain sabu-sabu, polisi juga menemukan peredaran sinte dengan jumlah barang bukti yang cukup besar.

“Dari Januari sampai Oktober, laporan polisi yang kami ungkap sebanyak 105. Kasus yang paling banyak adalah sabu-sabu, dengan 61 kasus dan barang bukti 1.288 gram,” kata Nasdian, mewakili Kasat Resnarkoba Polres Cilegon IPTU Gregorius Michael Patria Tama, Senin (26/10).

Selain sabu-sabu, polisi mengungkap 27 kasus sinte dengan barang bukti seberat 1.595 gram. Pengungkapan ganja tercatat dua kasus dengan barang bukti sekitar 1,5 gram. Sementara itu, kasus obat-obatan tercatat sebanyak 14 laporan dengan barang bukti 5.314 butir. Polisi juga mengungkap satu kasus psikotropika dengan barang bukti 229 butir.

Nasdian mengatakan, berdasarkan pengungkapan dalam dua bulan terakhir, Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak menjadi wilayah yang mendapat per-



KBO Satresnarkoba Polres Cilegon Iptu Nasdian, mewakili Kasat Resnarkoba Polres Cilegon IPTU Gregorius Michael Patria Tama, akan terus menekan peredaran narkoba.

hatian dalam pemetaan peredaran narkoba. Namun, tingkat kerawanan dapat berubah mengikuti perkembangan kasus di lapangan.

“Untuk wilayah rawan sifatnya tentatif. Bulan ini bisa di kecamatan ini, bulan depan pindah lagi. Namun, dalam dua bulan terakhir, yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Pulomerak,” ujarnya.

Ia menegaskan, temuan kasus di Kecamatan Pulomerak berada di luar kawasan pelabuhan. Hingga saat ini, pihaknya belum mengungkap kasus peredaran narkoba dari Sumatra menuju Jawa melalui

jalur tersebut.

Selain menyasar kawasan permukiman, polisi juga menyoroti modus transaksi narkoba yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Pelaku menggunakan telepon seluler untuk mengarahkan pembeli mengambil barang yang sebelumnya diletakkan di titik tertentu.

“Sekarang mereka menggunakan map. Barang disimpan di dekat tiang listrik atau pohon, kemudian pembeli diberi tahu lokasinya melalui telepon seluler. Jadi, antara pembeli dan penjual

tidak bertemu langsung,” jelasnya.

Menurut Nasdian, rumah kos yang berkaitan dengan perkara narkoba tidak selalu digunakan sebagai tempat transaksi. Berdasarkan hasil pengembangan sejumlah kasus, lokasi tersebut diduga menjadi tempat tinggal pelaku sekaligus tempat menyimpan barang yang belum terjual.

Polisi biasanya mengetahui keberadaan rumah kos setelah mengembangkan perkara yang lebih dahulu diungkap. Sementara transaksi dilakukan di lokasi lain dengan memanfaatkan sistem pengambilan barang tanpa pertemuan langsung.

Untuk menekan peredaran narkoba, Polres Cilegon berencana meningkatkan pengawasan di rumah kos dan kawasan permukiman yang dicurigai menjadi lokasi peredaran. Langkah tersebut juga mencakup pelaksanaan tes urine serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

“Sesuai perintah Bapak Kapolres, kami akan mengadakan tes urine dan meningkatkan pengawasan, terutama di rumah kos serta permukiman yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba,” kata Nasdian.

Ia menambahkan, pengawasan akan melibatkan pengurus RT dan kalangan pemuda agar aktivitas mencurigakan dapat lebih cepat diketahui. Kepolisian berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan dan menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Cilegon.

(CR-03/PAY)

Dihantam Ombak di Selat Sunda, Dua Nelayan Tewas

CILEGON, BANPOS – Dua nelayan tewas setelah perahu pancing katir yang mereka tumpangi terbalik dihantam ombak di perairan Selat Sunda, sekitar Pulau Tempurung, Merak, Senin (26/10). Sementara satu nelayan lainnya, Ujang Sutisna, 34, berhasil selamat setelah dievakuasi kapal penumpang SMS Sagita.

Kedua korban meninggal dunia diketahui bernama Afendi, 36, warga Kota Serang, dan Sugarto, 38, warga Temu Putih, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon. Jenazah keduanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon untuk menjalani visum.

Kasus Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan pihaknya menerima laporan kecelakaan laut yang melibatkan tiga nelayan di sekitar Pulau Tempurung. Informasi awal diperoleh setelah kapal penumpang SMS Sagita melihat para korban mengapung di laut sekitar pukul 15.20 WIB. “Korban ada tiga orang, dua meninggal dunia, dan satu selamat di sekitar Pulau Tempurung,” kata Rizky, Senin (26/10).

Menurut informasi yang diterima petugas, perahu terbalik setelah dihantam ombak saat ketiga nelayan sedang memancing. Mereka sempat berusaha bertahan dengan mengapung di laut selama sekitar satu jam 30 menit sebelum ditemukan. “Kapal terhantam ombak lalu ter-

balik saat memancing, korban sempat berusaha mengapung selama satu jam 30 menit,” ujarnya.

Awak SMS Sagita kemudian melakukan manuver untuk mendekati korban dan mengevakuasi mereka menggunakan pelampung cincin atau ring buoy. Ujang yang selamat dibawa ke Pelabuhan Merak, kemudian mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pulomerak. Sementara itu, dua nelayan yang meninggal dunia dibawa menggunakan kapal nelayan menuju Pantai Mabak, Merak, sebelum dievakuasi ke RSUD Cilegon.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten, Kolonel Laut Wawan Subagyo Mardani, mengatakan evakuasi berlangsung di kawasan Pantai Mabak, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak. Operasi tersebut melibatkan personel Lanal Banten, kapal patroli Ditpolairud Polda Banten, kapal pancing Ciles, Basarnas Merak, dan Tagana Merak Banten.

Wawan menjelaskan, tim SAR gabungan bergerak setelah menerima laporan dari nelayan mengenai kecelakaan perahu pancing katir di perairan Selat Sunda. Setelah dievakuasi, kedua jenazah dibawa ke RSUD Cilegon untuk menjalani visum et repertum. “Selama kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Korban selamat sudah dievakuasi ke Puskesmas Pulomerak,” kata Wawan. (CR-03/PAY)

RUANG PUBLIK

Nepotisme Terang-Terangan

OLEH:

Eko Supriatno

Mahasiswa doktor
Administrasi Publik di Universitas
Muhammadiyah Jakarta (UMJ)



DUA putra Menteri Haji dan Umrh, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, diangkat sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpin ayah mereka. Nama Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz tercatat dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrh Nomor 3 Tahun 2026. Saat hubungan keluarga bertemu kewenangan negara, siapa menjamin kesempatan tetap adil?

Gus Irfan menjelaskan bahwa kedua putranya membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji selama tiga hingga empat bulan, saat lembaga itu belum memiliki kantor dan staf memadai. Menurutnya, mereka bekerja sukarela tanpa gaji. Pengabdian patut dicatat, tetapi tak menjawab persoalan pengangkatan. Kerja tanpa bayaran tak membuktikan jabatan diperoleh lewat proses terbuka, berda-

sarkan kompetensi, dan bebas konflik kepentingan.

Jasa masa lalu bukan cek kosong untuk jabatan publik. Negara tidak mengenal balas budi keluarga. Jika keduanya memiliki keahlian, pemerintah harus membuka dasar pengangkatan, kualifikasi, mekanisme pemilihan, dan tugas mereka. Ini bukan vonis bahwa keduanya tak cakap; kelayakan harus diuji dengan ukuran yang sama. Pemerintah perlu menjelaskan mengapa mereka dipilih.

Ini bukan gosip tentang anak seorang menteri, melainkan ujian etika kekuasaan. Kepercayaan personal tak boleh menggantikan prosedur adil; kewenangan bukan hak untuk terbebas dari pertanyaan.

Godaan Keluarga

Dalam *In Praise of Nepotism: A History of Family Enterprise from King David to George W. Bush*, Adam Bellow menelusuri nepotisme dalam sejarah dan politik. Judulnya provokatif: memuji nepotisme. Ia menjelaskan kecenderungan manusia mempercayai kerabat dan membangun pengaruh lewat ikatan darah. Keluarga dapat menumbuhkan solidaritas, tetapi ikatan privat bisa menutup kesempatan orang lain saat dibawa ke pusat kekuasaan.

Nepotisme bukan kebiasaan satu negeri atau rezim; ia berakar pada kecenderungan manusia. Namun, memahami bukan berarti membenarkan. Bisnis keluarga dapat melibatkan kerabat sesuai hukum. Negara bukan perusahaan keluarga:

menteri bukan pemilik kementerian, presiden bukan pemilik republik, dan jabatan publik bukan harta warisan. Pertanyaan Bellow bukan apakah keluarga boleh bekerja di sektor publik. Tentu boleh, selama memenuhi syarat. Persoalannya: kesempatan diperoleh karena kompetensi atau akses yang tak dimiliki pelamar lain? Keluarga boleh mewariskan pengetahuan; negara tak boleh mewariskan privilese.

Lingkar Kuasa

Polemik ini bukan satu-satunya perkara kekerabatan dan jabatan. Dugaan penempatan kerabat sebagai komisaris BUMN yang dikaitkan dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggo-do turut disorot. Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, diperdebatkan saat dicalonkan sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia terkait konflik kepentingan dan independensi bank sentral; ia kemudian menjabat. Penunjukan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi juga memunculkan pertanyaan etis.

Kasus-kasus itu tidak identik, dan hubungan keluarga bukan bukti otomatis pelanggaran hukum. Namun, pola pengangkatan yang dikaitkan dengan kekerabatan memunculkan pertanyaan: apakah lembaga negara bekerja profesional atau memberi ruang lebih luas kepada orang dekat kekuasaan?

Nepotisme, konflik kepentingan,

dan pelanggaran hukum harus dibedakan. Konflik kepentingan muncul ketika hubungan pribadi berpotensi memengaruhi kewenangan. Nepotisme ialah pengutamaan kerabat dalam pemberian jabatan; pelanggaran hukum harus dibuktikan dengan aturan dan fakta. Ketiganya dapat beririsan, tetapi tidak sama. Kritik harus teliti agar kekuasaan tak bisa mengelak dengan menyerang argumen pengkritiknya.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan menyediakan kerangka penanganan. Kepentingan harus diungkap, keputusan diperiksa objektif, dan pejabat tak boleh menjadi satu-satunya penilai atas tindakannya. Publik berhak mendapat penjelasan tentang dasar pengangkatan, kualifikasi, seleksi, dan tugas sesuai aturan keterbukaan informasi. Pemerintah harus menjawab dengan bukti dan menegakkan aturan tanpa pandang kedekatan.

Pintu Istimewa

Saya menolak anggapan bahwa anak pejabat harus dilarang bekerja di pemerintahan. Seseorang tak kehilangan hak berkariyer karena lahir dalam keluarga berkuasa. Menghukum berdasarkan silsilah sama kelirunya dengan memberi keistimewaan atas dasar yang sama. Yang harus dinilai ialah kemampuan, integritas, persyaratan, dan proses pengangkatan. Persoalannya bukan darah seseorang, melainkan pintu yang terbuka lebih lebar karena hubungan

dengan kekuasaan.

Meritokrasi terdengar meyakinkan dalam pidato reformasi birokrasi, tetapi diuji saat berhadapan dengan kepentingan orang terdekat. Standar keras bagi orang luar tetapi longgar bagi lingkaran sendiri bukan meritokrasi, melainkan privilese beralut profesionalisme.

Di luar lingkaran kekuasaan, orang menempuh pendidikan, membangun keahlian, dan meniti karier dengan keyakinan bahwa kemampuan membuka jalan. Mereka menuntut proses yang tak dicurangi akses personal. Jika koneksi tampak lebih menentukan daripada kompetensi, kepercayaan anak muda pada keadilan bisa runtuh sebelum mereka bertanding.

Saya menolak dua jalan pintas: menganggap setiap pengangkatan kerabat pasti salah, atau menerimanya hanya karena pejabat mengaku percaya kepada orang pilihannya. Pertanyaan pokok: apa kualifikasinya, bagaimana presensy, dan siapa yang mengawasi? Jika layak, tunjukkan ukurannya; jika proses bersih, buka dasar keputusan. Kepercayaan personal tak boleh menggantikan pertanggungjawaban publik.

Negara Bukan Warisan

Nepotisme tak bisa diatasi dengan pidato antikorupsi. Diperlukan kriteria pengangkatan jelas, kompetensi terukur, pengungkapan konflik kepentingan, dan pengawasan independen. Seleksi wajib harus dijalkan; posisi dengan ruang diskresi justru memerlukan penjelasan

lebih terang. Diskresi bukan kekebalan dari pemeriksaan.

DPR dan lembaga pengawas harus menerapkan ukuran sama kepada semua pejabat. Mengutuk nepotisme lawan sambil memaklumi di kubu sendiri menjadikan meritokrasi alat politik. Media dan masyarakat sipil perlu mengungkap masalah tanpa mengubah dugaan menjadi vonis. Kritik harus tajam, tetapi disiplin terhadap fakta.

Adam Bellow mengingatkan bahwa kecenderungan mengutamakan keluarga tak akan hilang begitu saja. Namun, negara dibentuk agar kepentingan bersama tak bergantung pada watak baik penguasa. Sistem sehat memastikan keputusan dapat diuji, bahkan ketika pejabat merasa tindakannya wajar.

Pertanyaan tentang nepotisme ialah siapa yang memiliki negara. Jika jabatan menjadi hadiah bagi orang dekat, urusan keluarga dan publik bercampur. Jika kesempatan ditentukan akses, meritokrasi tinggal hiasan pidato. Negara wajib memastikan jalan menuju jabatan tak ditutup privilese yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Nepotisme berbahaya ketika kedekatan menggantikan kelayakan dan kewenangan negara diperlakukan sebagai milik pribadi. Jabatan publik bukan warisan, kementerian bukan perusahaan pribadi, dan republik bukan rumah bagi orang dekat penguasa.

Meritokrasi bukan janji hasil sama, melainkan kesempatan yang tak ditentukan silsilah. Kemampuan dan integritas harus lebih berarti daripada kedekatan dengan kekuasaan. Ukuran pemerintahan adil ialah apakah orang tanpa koneksi tetap mendapat kesempatan setara.*

BANTEN POS

Inspirasi dan Semangat Baru Banten

PEMBINA

Kiki Iswara Dharmayana

KOMISARIS UTAMA

Karim Paputungan

KOMISARIS

Maria Hanief

DIREKTUR

Rumi Nugraha dan M. Fahmi

PT BANTEN BERITA MERDEKA

Kantor: Ruko RDM, Jln. TB Suwandi/Lingkar Selatan
Blok D, No.3, Kota Serang, Banten
Telephon/Fax: (0254) 407 8285
No. Rek: Bank BJB - 0018 21501 2001
BCA -2454 061 704
(a/n PT. BANTEN BERITA MERDEKA)

Percetakan:

WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

Jl. Jampang No. 99A, Bekasi. Telp: 0811 1071 633

DEWAN REDAKSI: Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, M. Fahmi, Saepudin, Chandra Magga | PEMIMPIN PERUSAHAAN: Saepudin | PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Chandra Magga | REDAKTUR PELAKSANA: Azmart Tusnedi | REDAKTUR: Ghuroofie Dzhillilhub, Stefano, Dedi Rustandi | SEKRETARIS REDAKSI: Cahya Andini | REPORTER: CH Widodo Haidar, Dede Suhada, Suganda, M. Wahyu, Taufiq Solehudin, Edwin Mahesa Pardede | PENGEMBANGAN BISNIS: Sobar Rohmat | IKLAN: Zulfa Nadira (Manager), Dody Fitriadi | FOTOGRAFER: Dziki Oktomaulyadi | PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriadi (Manager), Fauzi Sandi, M Sy Ian Sangadi | GRAFIS: Ahmad Bukhori | ACCOUNTING: Ifroh Hardianti | ADMINISTRASI KEUANGAN: Azi Abdurohman | ADMINISTRASI PAJAK: Nadia Al Vani | ADMINISTRASI: Nia Aryanti | PEMASARAN: Eply Wahyudi

PERWAKILAN TANGERANG :

Komplek Green Garden Blok A-1, No. 2
Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang, Banten

PERWAKILAN JAKARTA :

Gedung Graha Pena, Lantai 5
Jalan Kebayoran Lama No.12,
Jakarta Selatan
Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN :

PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN

TARIF IKLAN	ADVERTORIAL		IKLAN CILIK/BARIS Rp. 23.000/baris - Minimal 3 baris - Maksimum 7 baris
	Hitam Putih (BW)	: Rp. 47.000/mm kolom	
Warna (FC)	: Rp. 69.000/mm kolom		
SOSIAL/KELUARGA	Hitam Putih (BW)	: Rp. 30.500/mm kolom	
	Warna (FC)	: Rp. 54.500/mm kolom	

PANDEGLANG

Batas Pandeglang-Lebak Diverifikasi, Kesepakatan Diusulkan ke Kemendagri

PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Lebak menyepakati hasil verifikasi penegasan batas wilayah administrasi kedua daerah. Kesepakatan tersebut akan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Banten untuk diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penegasan batas wilayah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan data

administrasi dengan kondisi di lapangan, serta meminimalkan potensi persoalan kewilayahan yang dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara hasil verifikasi di Oproom Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Senin (26/10).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Asep Rahmat, mengatakan penegasan batas daerah bukan

sekadar menentukan garis administrasi, melainkan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan data kewilayahan, dan pelayanan kepada masyarakat. “Penegasan batas wilayah bukan sekadar menentukan garis administrasi antardaerah, melainkan juga menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan data kewilayahan, serta pelaksanaan pelayanan publik,” katanya.

Menurut Asep, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat dan objektif dengan mengacu pada data serta fakta di lapangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejelasan batas wilayah diharapkan dapat mengurangi perbedaan penafsiran sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan antara Pandeglang dan Lebak.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat 10 kecamatan di Pandeglang yang menjadi bagian dari proses verifikasi, yakni Koroncong, Pandeglang, Banjar, Mekarjaya, Cipecung, Bojong, Picung, Sindangresmi, Munjul, dan Cikeusik. Sementara dari Kabupaten Lebak, lima kecamatan turut dibahas, yaitu Cikulur, Banjarsari, Warunggunung, Cileles, dan Wanasalam.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak, Alkadrie, mengatakan pene-



gasan batas diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan verifikasi karena data administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. “Baik secara de facto maupun de jure, keduanya harus selaras. Perbaikan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Jika titik koordinat tidak sesuai, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, bahkan dapat mengganggu investasi,” ujarnya.

Alkadrie berharap kesepakatan tersebut menjadi dasar penyamaan persepsi dalam menyelesaikan perbedaan data dan kondisi faktual batas wilayah kedua kabupaten. Ia juga mengapresiasi fasilitasi Pemkab Pandeglang dalam proses

koordinasi dan verifikasi. “Mudah-mudahan melalui kesepakatan bersama, tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam penegasan batas wilayah,” katanya.

Kepala Bagian pada Pemerintah Provinsi Banten, Evi Syaefudin, menjelaskan berita acara yang telah ditandatangani kedua pemerintah kabupaten selanjutnya diproses untuk diajukan kepada Kemendagri melalui mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan penegasan batas daerah menjadi salah satu tugas Biro Pemerintahan Provinsi Banten untuk memastikan kejelasan batas administrasi antardaerah. “Artinya, pada tahun ini dua pekerjaan rumah kami telah diselesaikan, yakni penegasan batas antara Kota Serang dan Kabupaten Serang, serta hari ini antara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak,”

jelasnya.

Evi menambahkan, pada tahun mendatang pihaknya akan melanjutkan penanganan penegasan batas wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, Pemkab Pandeglang juga memperkenalkan GEBER LAPOR sebagai saluran pengaduan masyarakat yang ditujukan untuk mendukung penanganan persoalan pelayanan publik secara responsif, transparan, dan akuntabel. Asep mengatakan, layanan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, termasuk apabila masih ditemukan kendala terkait batas wilayah administrasi.(DHE/PAY)

KOTA BADAK



15 Tahun Mengabdi, Endan Umar Tinggalkan Humas DPRD Pandeglang

MOCH. Endan Umar Murdani mengakhiri pengabdianya di Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang setelah bertugas selama 15 tahun. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akrab disapa Pak Wali atau Ka Haji di kalangan jurnalis itu akan melanjutkan karier di Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai 1 November 2026.

Kepindahan Endan menjadi pendandan berakhirnya kiprahnya di lingkungan legislatif Pandeglang, terutama dalam membangun komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan insan pers. Sejak ditempatkan di Sekretariat DPRD Pandeglang pada 2011, alumnus Magister Administrasi Publik itu telah menjalani sejumlah penugasan. Ia mengawali tugas sebagai Koordinator Pendamping Komisi III, kemudian beralih menjadi Koordinator Pendamping Komisi I.

Pada 2015, Endan dipercaya menangani bidang kehutanan Sekretariat DPRD hingga 2026. Selama menjalankan tugas tersebut, ia menjadi penghubung komunikasi antara pimpinan dan anggota DPRD dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintah, kepolisian, partai politik, hingga organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Di kalangan wartawan, Endan dikenal sebagai salah satu penghubung dalam koordinasi peliputan dan berbagai agenda kelembagaan DPRD. Sikapnya yang terbuka dan komunikatif membuatnya dekat dengan insan pers yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan legislatif.

Mbae, salah seorang staf Humas Sekretariat DPRD Pandeglang yang sehari-hari bekerja bersama Endan, menilai rekannya itu memiliki kemampuan bergaul yang baik dengan berbagai kalangan. “Pak Endan itu ASN yang sangat humanis dan humoris. Setiap tamu yang datang selalu diterima dengan baik, orangnya tidak neko-neko dan sangat luas pergaulannya, terutama di kalangan wartawan dan OKP,” tuturnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,

TB Agus Khotibul Umam. Ia menilai Endan merupakan pegawai yang loyal dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menjaga hubungan kelembagaan. “Memiliki kompetensi komunikasi yang luar biasa serta mampu menjaga stabilitas hubungan kemitraan antara DPRD dengan publik dan media massa selama bertahun-tahun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang ling Andri Supriadi menyambut Endan sebagai ASN yang humanis, adaptif, dan mampu menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, khususnya wartawan dan organisasi kepemudaan. Menurut ling, komunikasi yang terbangun selama ini turut mendukung kolaborasi antara pihak internal pemerintahan dan unsur eksternal, baik eksekutif maupun legislatif. “Bulan ini mungkin menjadi jabatan terakhir Endan sebagai humas di Kabupaten Pandeglang. Tentu kami Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan pengabdianya. Semoga pengabdianya dibalas dengan ganjaran berlipat ganda oleh Allah SWT,” ujarnya.

ling menambahkan, pemerintah daerah akan mencari sosok yang mampu melanjutkan fungsi kehumasan dengan pendekatan humanis, adaptif, dan komunikatif. Masukannya dari kalangan wartawan juga terbuka untuk menjadi bahan pertimbangan. “Nanti kami akan mencari sosoknya. Barangkali ada masukannya dari teman-teman wartawan untuk menjadi bahan pertimbangan Pemda, tentu tidak menjadi persoalan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Endan mengaku kepindahan tersebut menjadi momen emosional setelah menghabiskan sebagian besar perjalanan kariernya di Sekretariat DPRD Pandeglang. Meski demikian, ia memandang perpindahan tugas sebagai bagian dari perjalanan pengabdian seorang ASN. “Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin sudah saatnya takdir saya melanjutkan karier ASN di Kementerian Haji dan Umrah. Mohon doa dan dukungannya, semoga amanah dan berkah,” ujarnya.(DHE/PAY)

Pandeglang Siapkan 658 Calon Jamaah Haji 2027

PANDEGLANG, BANPOS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenuh) Kabupaten Pandeglang menetapkan 658 calon jamaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi untuk persiapan pemberangkatan musim haji 2027. Selain kuota utama, disiapkan 290 calon jamaah cadangan untuk mengantisipasi kekosongan kuota akibat calon jamaah yang batal berangkat.

Kepala Kemenhaj Kabupaten Pandeglang, Supardi, mengatakan calon jamaah yang masuk kuota utama merupakan pendaftar yang telah memenuhi ketentuan urutan porsi. Penetapan tersebut menjadi

dasar persiapan administrasi dan tahapan pelayanan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

“Kuota pemberangkatan haji Kabupaten Pandeglang berdasarkan urutan porsi ditetapkan sebanyak 658 orang dan cadangan 290 orang,” kata Supardi kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Ia mengimbau calon jamaah yang masuk daftar cadangan segera mengurus paspor dan melengkapi dokumen administrasi kependudukan. Kesiapan dokumen diperlukan agar calon jamaah dapat segera diproses apabila terdapat kuota kosong yang bisa diisi sesuai ketentuan.

Supardi mengatakan, besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dilunasi calon jamaah masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat. Karena itu, calon jamaah diminta mempersiapkan dana pelunasan sembari menjaga kondisi fisik.

Di sisi lain, Kemenhaj Pandeglang terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan calon jamaah, terutama terkait persyaratan kesehatan.

“Dokumen calon jamaah haji tahun 2027 seluruhnya sudah lengkap dan saat ini kami menunggu

penetapan istithaah kesehatan dari Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Penetapan istithaah kesehatan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan calon jamaah memenuhi persyaratan kesehatan sebelum berangkat. Selain pemeriksaan kesehatan, pendampingan manasik juga disiapkan agar jamaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemenhaj Pandeglang menyatakan akan mengawal seluruh tahapan persiapan, mulai dari kelengkapan administrasi hingga kesiapan kesehatan calon jamaah, agar proses pemberangkatan haji 2027 berjalan sesuai ketentuan.(DHE/PAY)

DMI Pandeglang Bentuk Komunitas Donor Darah Berbasis Masjid



Para peserta saat melakukan donor darah.

PANDEGLANG, BANPOS – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Pandeglang membentuk Komunitas Donor Darah Berbasis Masjid (KDDM) untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan darah. Program yang diluncurkan di Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang, Sabtu (24/10), itu akan di-

jalankan secara berkala dengan melibatkan jamaah masjid di berbagai wilayah.

Pembentukan komunitas tersebut merupakan kerja sama DMI Kabupaten Pandeglang dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pandeglang dan Ikatan Remaja Masjid (Irema) Masjid Agung Ar-Rahman. Program ini se-

kaligus mendorong masjid berperan lebih luas dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Ketua pelaksana kegiatan yang juga pengurus DMI Pandeglang, Elin Herlina, mengatakan pembentukan KDDM dilandasi kepedulian terhadap sesama serta kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukan transfusi. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan darah membutuhkan partisipasi pendonor sukarela secara berkelanjutan. Terlebih, sejumlah komponen darah memiliki masa penyimpanan terbatas sehingga ketersediaannya perlu dijaga. “Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketersediaan pendonor sukarela yang dapat berpartisipasi secara rutin,” kata Elin.

Ia berharap, KDDM dapat memperluas basis pendonor di masyarakat sehingga kebutuhan darah, termasuk golongan darah tertentu, dapat diantisipasi melalui partisipasi yang terorganisasi.

Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Pandeglang, Ramadhani, mengatakan kegiatan donor darah melalui KDDM direncanakan berlangsung setiap tiga bulan sekali.

Anggotanya akan direkrut dari jamaah masjid di wilayah Kabupaten Pandeglang. “DMI optimistik program tersebut dapat dikembangkan di masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Dengan jaringan masjid yang tersebar di berbagai wilayah, komunitas ini diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan mengajak lebih banyak masyarakat menjadi pendonor sukarela,” ujarnya.

Menurut Ramadhani, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, tidak hanya dalam kegiatan ibadah, tetapi juga dalam aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap, pelaksanaan donor darah secara berkala dapat menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus membantu mendukung ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan. “Untuk masyarakat yang ingin bergabung dengan KDDM dapat menghubungi Sekretariat DMI Kabupaten Pandeglang di Masjid Agung Ar-Rahman,” pungkasnya.(DHE/PAY)

IKLAN LARIS

Info Iklan:
- 051334404392
- 057505531153

KEHILANGAN

Telah Kehilangan 1 Ekslembar Surat Berharga BPKB Sepeda Motor - BPKB R2 NOPOL: A-6101-DZ, Tahun Pembuatan: 2023/2024, Warna: Merah Hitam, NOKA: MH1JM8124124PK317277, NOSIN: JM81E2317432, WARNA TNKB: PUTIH ATAS NAMA: PELAPOR, Diketahui Hilang pada Tanggal 13 Oktober 2026 Pukul 23.00WIB Di Jl. Perumahan Waringinkurung, Waringinkurung, Kabupaten Serang Banten

Atas nama pemilik BPKB TAN IE CIAW yang beralamat di jln pluit sakti 4/34 RT.005 RW.007 Kel. Pluit kec. Penjarangan Kota. Jakarta utara Prov. DKI Jakarta
HP 081399356786

Kehilangan: BPKB Dan STNK Mobil Suzuki Futura B 9352 CUB NOSIN : G15AID942107 NOKA : MHYESL415EJ305618 Hub : 085697455893

SURAT BERTANGGA BPKB SEPEDA MOTOR - BPKB R2 Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 an. H.SALAMI dengan No. Pol A 6302 CQ No. Rangka MH1JFP128GK780124 No. Mesin JFP1E2761401 yang dikeluarkan oleh sat lantas polresta serang kota

TELAH HILANG SURAT TANAH : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01447 NIB : 28.04.01.10.02331 Surat Ukur No. 33/PETE / 2008, Luas 60 m2 Desa Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten, AN. IBRAMSA.

MAKANAN

Jual/menerima pesanan Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur. alamat: Lampu merah Perumahan Graha Asri, Ciracas, Kota Serang - Banten Hub: Jejen 0878 7346 4053

WEBSITE
www.banpos.co

EMAIL
iklanbantenpos@gmail.com

TWITTER
@bantenpos

INSTAGRAM
banten_pos

FACEBOOK
facebookbantenpos

YOUTUBE
Banpos Channel

LEBAK

TERDAKWA KASUS PENIPUAN UMRAH DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA



Suasana persidangan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus penipuan travel umrah, Ompel Sutrisno, di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Senin (26/10).

LEBAK, BANPOS - Ompel Sutrisno, terdakwa kasus penipuan travel umrah, dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lebak. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Senin (26/10).

JPU, Alkindy Erada Qifta, menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ompel dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujarnya.

Jaksa juga meminta agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang hukuman. Selain itu, terdakwa diminta tetap berada dalam tahanan.

“Dikurangi selama terdakwa ber-

ada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap dalam tahanan,” imbuhnya.

Dalam persidangan, jaksa memaparkan sejumlah hal yang membebankan tuntutan terhadap Ompel. Salah satunya, perbuatan terdakwa menyebabkan 28 calon jemaah gagal berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah umrah. Total kerugian dalam perkara tersebut mencapai Rp780,5 juta.

Jaksa juga menilai perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik dan merusak kredibilitas PT ISG Rabbani Globalindo. Selain itu, saksi Jarman turut dirugikan karena harus menghadapi tuntutan pertanggungjawaban dari para calon jemaah.

“Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jarman dimintai pertanggungjawaban oleh para calon jemaah sehingga nama baiknya tercemar,” ujar Alkindy.

Hal lain yang memberatkan, me-

nurut jaksa, terdakwa melakukan perbuatannya demi kepentingan pribadi dan tidak menunjukkan niat untuk mengganti kerugian para korban. Terdakwa juga sempat melarikan diri ke Magelang, Jawa Tengah, saat hendak ditangkap.

Jaksa turut menyebut tidak ada korban yang memaafkan perbuatan terdakwa maupun memberikan hal yang meringankan dalam perkara tersebut.

“Para calon jemaah selaku korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa, tidak ada yang meringankan,” ucapnya.

Mendengarkan tuntutan tersebut kuasa hukum Ompel Sutrisno memohon kepada majelis hakim supaya diberikan waktu selama sepekan untuk menyusun nota pembelaan. Permohonan itu pun diterima dan majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan akan melanjutkan pada Senin, 2 November 2026.(TQS/RUS)

MULTATULI



MA, terduga pelaku pengangkut benih bening lobster (BBL) tanpa izin kini diamankan Polres Lebak

Bawa Benih Lobster Ilegal, Pria Asal Sukabumi Ditangkap Polres Lebak

POLRES Lebak menangkap seorang pria asal Sukabumi berinisial MA karena diduga mengangkut benih bening lobster (BBL) tanpa izin. Dalam pengungkapan tersebut sebanyak 32 ribu ekor benih lobster serta satu unit kendaraan roda empat diamankan pihak Kepolisian sebagai barang bukti.

Kepala Polres Lebak, AKBP Arninsi, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut terjadi di Jalan Raya Malingping-Bayah, Desa Hegarmanah, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak pada Rabu (21/10) sekitar pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Fredo, MA diduga membawa benih lobster yang dikemas dalam lima wadah plastik jenis polybag.

Benih tersebut diangkut menggunakan mobil bernomor polisi F 1433 VN.

“Rencananya, benih bening lobster tersebut akan dibawa menuju wilayah Cisolok, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk selanjutnya diperjual-belikan,” katanya, Senin (26/10).

Dalam kasus tersebut, polisi menyita sekitar 32 ribu ekor benih lobster dan satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkutnya.

Atas dugaan perbuatannya, MA dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Penerapan pasal tersebut akan disesuaikan dengan hasil penyelidikan dan pembuktian unsur tindak pidana,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lebak, AKP Fredo Leonard, mengatakan pihaknya berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga akan mendalami kasus itu untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat.

“Kami juga akan mendalami asal-usul benih bening lobster yang diamankan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan pengangkutan dan rencana perdagangannya,” terangnya.

Fredo mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pengangkutan maupun perdagangan benih bening lobster secara ilegal karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan kegiatan perikanan ilegal,” pungkasnya.(TQS/RUS)

Hasbi Dorong Nobu Bank Perluas Pembiayaan UMKM

LEBAK, BANPOS - Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, mendorong Nobu Bank memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lebak. Kehadiran layanan perbankan tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha lokal dan meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Hal itu disampaikan Hasbi saat menghadiri pembukaan operasional Nobu Bank di Rangkasbitung, Senin (26/10). Hasbi mengatakan, kehadiran bank di Kabupaten Lebak diharapkan tidak hanya menyediakan layanan transaksi keuangan, tetapi juga berkontribusi

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Menurut dia, dukungan perbankan dibutuhkan untuk memperkuat sektor usaha produktif, termasuk UMKM.

“Kami mendorong agar Nobu Bank dapat mengambil peran dalam tiga hal utama, yaitu memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat, memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif dan UMKM, serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bupati.

Ia berharap operasional Nobu Bank di Rangkasbitung menjadi awal kerja sama yang produktif dan

berkelanjutan dengan pemerintah daerah serta para pelaku usaha.

Selain memperluas akses layanan keuangan, Hasbi berharap bank tersebut dapat membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah tinggal dan menyediakan peluang pembiayaan bagi pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya.

“Semoga kehadiran Nobu Bank dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak, memperluas akses keuangan rakyat, dan mendukung para pengusaha lokal dalam mengembangkan usahanya. Ini merupakan bagian dari upaya bersama

untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta Kabupaten Lebak yang Ruhay,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Nobu Bank, Steve Marciano Joe, mengatakan kehadiran Nobu Bank di Kabupaten Lebak merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Kami berharap layanan perbankan yang dihadirkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam mendukung kepemilikan rumah tinggal, pengembangan UMKM, maupun pertumbuhan usaha para pengusaha lokal,” pungkasnya.(TQS/RUS)



Pertanian hortikultura jenis mentimun usia 10 hari setelah tanam (HST) di Kabupaten Lebak, Banten.

Petani Ramai-Ramai Tanam Mentimun

Penuhi Permintaan Pasar Induk

LEBAK, BANPOS - Sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten, sejak tiga bulan terakhir menanam tanaman hortikultura jenis mentimun untuk memenuhi permintaan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang.

“Kita sekarang tanam kedua untuk mentimun di lahan seluas 5.000 meter persegi,” kata Samun, petani di Warunggunung, Lebak, Senin (26/10).

Produksi tanam pertama mentimun menguntungkan, karena permintaan Pasar Induk Tanah Tinggi cukup tinggi.

Bahkan, harga mentimun di tingkat petani menembus Rp7.000 per kilogram.

“Karena itu, kebanyakan petani di sini saat musim kemarau mengembangkan pertanian mentimun,” kata Samun.

Mereka petani beralih ke pertanian mentimun, selain permintaan pasar tinggi juga harganya relatif baik dan cepat menghasilkan.

Sebab, tanaman mentimun di usia 35-40 hari setelah tanam (HST) bisa dipanen dan menghasilkan produksi.

“Kita memperkirakan dari tanam 5.000 meter persegi bisa menghasilkan 5 ton dengan harga Rp7.000/kg, sehingga dikalkulasikan menghasilkan pendapatan Rp35 juta,” katanya menjelaskan.

Yanto (60), petani di Bojongleles,

Cibadak, Lebak, mengatakan dirinya mengembangkan mentimun jenis Bandana di lahan 1 hektare dengan usia antara rata-rata 15 HST.

Produksi ketimun bandana selain dipasok ke Pasar Rangkasbitung juga ke Pasar Induk Tanah Tinggi.

“Kami mengembangkan tanam mentimun, karena permintaan pasar meningkat,” katanya.

Begitu juga Yana (55) memasok mentimun Bandana ke Pasar Induk Tanah Tinggi karena permintaan tinggi.

Saat ini, kata dia, dirinya memiliki lahan mentimun Bandana seluas satu hektare dengan enam kali panen.

“Kami hari ini memasok mentimun Bandana sekitar 2 ton dengan

pendapatan Rp14 juta dari harga Rp7.000/kg,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Dodi Hermawan mengatakan pihaknya mendorong agar petani dapat mengembangkan tanaman hortikultura jenis sayuran, karena permintaan pasar cukup tinggi.

Saat ini, petani yang banyak mengembangkan pertanian mentimun berada di Kecamatan Cibadak, Warunggunung, Rangkasbitung, Cimarga, Cikulur, dan Kalanganyar.

“Kami berharap semua petani di 28 kecamatan bisa menanam mentimun guna memenuhi permintaan pasar Induk Tangerang dan juga Jakarta,” katanya.(ANT/RUS)

Pasang Iklan DI SINI AJA....

Info Lebih Lanjut:
081334404392 / 087808831183

banpos channel
www.banpos.co.id
EMAIL: banpos@banpos.co.id
INSTAGRAM: banpos_ges
FACEBOOK: banpos_ges

Lawan Pertama di Piala Asia

Garuda Hadapi Samurai Biru

JEDDAH, BANPOS - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis jadwal lengkap Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang berlangsung 7 Januari-5 Februari. Timnas Indonesia berada di Grup F dan memulai perjalanan melawan Jepang pada Senin 11 Januari pukul 17.30 WIB. Laga itu digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah.

Setelah menghadapi Jepang, Indonesia bertemu juara Piala Asia 2023 Qatar di Stadion Aramco, Al Khobar. Laga berlangsung Sabtu 16 Januari pukul 23.30 WIB. Pertemuan terakhir di Grup F mempertemukan Indonesia dengan Thailand pada Rabu 20 Januari pukul 17.30 WIB.

Laga Thailand melawan Indonesia digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Jadwal itu menjadi acuan tim Garuda menyusun persiapan menuju putaran final. Penyisihan grup diikuti 24 tim dan berakhir pada 20 Januari.

Babak 16 besar berlangsung pada 22-25 Januari, disusul perempat final pada 28 dan 29 Januari. Semifinal dijadwalkan pada 1 dan 2 Februari. Laga puncak digelar 5 Februari di Stadion King Fahd Sports City. Stadion itu berkapasitas 72.000 penonton.

Laga pembuka Piala Asia edisi ke-19 berlangsung Kamis 7 Januari malam waktu setempat. Tuan rumah Arab Saudi menghadapi Palestina di Stadion King Fahd Sports City. Stadion itu berkapasitas 72.000 penonton.

Sebanyak delapan stadion di tiga kota menjadi arena 51 pertandingan Piala Asia 2027. Lima stadion berada di Riyadh, dua di Jeddah, dan satu di Al Khobar. Pemenang semifinal akan berebut gelar pada laga puncak di Jeddah.



Juara bertahan Qatar tetap menjadi penguasa sepak bola Asia saat ini. Indonesia akan menghadapi Qatar pada laga kedua Grup F di Al Khobar. Jadwal tersebut memberi jeda lima hari setelah pertandingan melawan Jepang.

Timnas Indonesia lalu meng-

hadapi Thailand pada laga terakhir Grup F di Jeddah. Laga itu menjadi penentu posisi akhir di grup. Jadwal lengkap AFC memuat tanggal, waktu, dan lokasi setiap pertandingan.

Pada laga pertama, Jepang vs Indonesia berlangsung Senin 11 Januari 2027 pukul 17.30 WIB atau

13.30 waktu setempat. Laga digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports City, Jeddah. Indonesia lalu menghadapi Qatar pada Sabtu 16 Januari 2027 pukul 23.30 WIB atau 19.30 waktu setempat di Stadion Aramco, Al Khobar.

Laga terakhir Grup F mem-

pertemuan Thailand vs Indonesia pada Rabu 20 Januari 2027 pukul 17.30 WIB atau 13.30 waktu setempat. Pertandingan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Jadwal itu menjadi acuan persiapan tim Garuda.

Piala Asia 2027 edisi ke-19 resmi

diikuti 24 tim dan menyajikan 51 pertandingan di tiga kota ini. Sebanyak delapan stadion digunakan, dengan lima di Riyadh, dua di Jeddah, dan satu di Al Khobar. Laga final berlangsung 05 Februari di Stadion King Fahd Sports City, Jeddah. (ANT/AZM)



Atlet para renang Indonesia Abdil Majid Rahman, meraih emas 100 meter gaya dada putra SB7 Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan waktu 1 menit 20,26 detik.

Debut Manis Abdil Raih Emas Menaklukkan Kolam Nagoya

NAGOYA, BANPOS - Menaklukkan kolam Nagoya menjadi momen bersejarah bagi atlet para renang Indonesia Abdil Majid Rahman. Ia meraih emas 100 meter gaya dada putra SB7 Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 dengan waktu 1 menit 20,26 detik. Emas itu menjadi debut manis bagi atlet berusia 17 tahun asal Kampar, Riau tersebut.

Abdil tampil tenang di lintasan meski baru pertama kali berlaga di multi cabang Asia. Ia mengungguli Zhang Yilong dari China dengan selisih tipis 0,01 detik. Persaingan melibatkan perenang dari China, Malaysia, Kazakhstan, Vietnam, dan Filipina.

“Maaf mas, saya agak gugup,” kata Abdil sambil tersenyum tipis.

Di balik ketenangan itu, Abdil mengaku belum terbiasa menghadapi kamera dan pertanyaan wartawan. Ia menundukkan kepala beberapa detik sebelum memberikan keterangan. Sorotan media menjadi pengalaman baru bagi atlet debutan tersebut.

Di kolam, Abdil menunjukkan keberanian berbeda dengan mengayunkan tangan dan membelah air. Catatan 1 menit 20,26 detik menempatkannya di garis finis terdepan. Emas itu melengkapi tiga medali emas cabang para renang Indonesia.

“Sangat menegangkan,” ujarnya.

Abdil datang ke Nagoya bermodal tekad dan persiapan pan-

jang dari Kampar, Riau. Ia belum memiliki pengalaman bertanding di ajang multi cabang level Asia. Pada usia 17 tahun, ia menghadapi tekanan kompetisi dan lawan berpengalaman.

Abdil mampu mengesampingkan keraguan saat berlomba dan memusatkan perhatian untuk Indonesia. Hasilnya melampaui harapan dengan medali emas pada debut Asian Para Games. Prestasi itu membuktikan pengalaman bukan satu-satunya penentu keberhasilan.

“Pokoknya saya harus bisa, harus bisa, itu yang selalu ada dalam pikiran saya,” ujarnya.

Emas Abdil melengkapi tiga medali emas cabang para renang bersama dua emas Maulana Rifky Yavianda. Kontingen Indonesia menempati peringkat kedelapan klasemen akhir Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Peringkat itu menjadi gambaran perjuangan kontingen yang dipimpin Chef de Mission Reda Manthovani.

Setiap medali memiliki arti penting sebagai bukti ketekunan, semangat, kerja keras, dan keberanian menghadapi tekanan kompetisi. Nama Abdil Majid Rahman menjadi bagian kisah besar Merah Putih di Nagoya dan pangung lahirnya juara baru Indonesia. Debut yang semula hanya untuk menimba pengalaman berubah menjadi panggung lahirnya juara terbaru yang membanggakan Indonesia di ajang Asia Tenggara. (ANT/AZM)

Putra Tri Ramadani Raih Perak di Santiago

SANTIAGO, BANPOS - Atlet panjat Indonesia Putra Tri Ramadani atau Srongdeng meraih medali perak nomor lead putra World Climbing Series Santiago 2026 di Chile. Ia menempati posisi kedua pada final dengan skor 49. Jonas Utelli asal Swiss menjadi juara dengan skor 52.

Neo Suzuki dari Jepang menempati posisi ketiga dengan skor 47+ dan melengkapi podium. Hasil resmi World Climbing menunjukkan Putra mengungguli sejumlah atlet unggulan dunia. Pada semifinal, Putra berada di peringkat pertama dengan capaian 33+.

Suzuki mengikuti di posisi kedua dengan 32+ dan Alberto Gines Lopez di urutan ketiga dengan 31+. Utelli menempati peringkat keempat semifinal dengan skor 31+. Alberto finis kedelapan pada final dengan skor 25.

Atlet Indonesia lainnya, Raharjati Nursamsa, meraih perak nomor speed putra pada kejuaraan yang sama. Ia mencatat waktu 5,06 detik pada partai final melawan Zhao Yicheng. Zhao merebut emas dengan

waktu 4,74 detik.

Indonesia menurunkan sejumlah atlet pada nomor speed putra dan putri serta lead putra. Pada speed putra, Indonesia diperkuat Raharjati, Veddriq Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al Hilmi. Putra dan Raharjati menambah koleksi medali Indonesia di Santiago.

Kejuaraan berlangsung di Chile pada akhir pekan waktu setempat. Final lead putra digelar Minggu waktu setempat atau Senin WIB. Hasil resmi World Climbing mencatat komposisi podium lengkap.

Putra tampil konsisten sejak babak semifinal. Capaian 33+ menempatkannya di puncak klasemen sementara. Suzuki dan Alberto mengikuti di belakang dengan selisih skor tipis.

Utelli sempat berada di peringkat keempat semifinal. Ia meningkatkan performa pada final dan merebut emas. Alberto justru turun ke posisi kedelapan final.

Raharjati melaju ke final speed putra setelah melewati rangkaian babak. Ia mencatat 5,06 detik dan

harus mengakui kecepatan Zhao. Catatan 4,74 detik membawa Zhao ke podium tertinggi.

Indonesia mengirim atlet pada nomor speed putra dan putri serta lead putra. Kehadiran Veddriq, Aditya, dan Antasyafi memperkuat tim speed putra. Hasil Santiago

menjadi bahan evaluasi menuju agenda berikutnya.

World Climbing Series Santiago 2026 menjadi rangkaian kompetisi di Chile. Nomor lead menuntut ketahanan dan strategi memba ca jalur. Nomor speed menuntut kecepatan reaksi. (ANT/AZM)



Atlet panjat Indonesia Putra Tri Ramadani

Kejurnas Tinju Amatir 2026 Resmi Ditutup

JAKARTA, BANPOS - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menutup Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko Infrastruktur 2026. Penutupan berlangsung di Pluit Village Mall, Jakarta Utara, Kemarin.

Kejurnas diikuti ratusan atlet dari 35 provinsi dalam kategori Junior, Youth, dan Elite.

Tim tinju DKI Jakarta membawa pulang dua emas dari kelas bergengsi. Sandyarto Faroya menang RSC pada ronde pertama di kelas 86 kilogram putra. Jorgi Aldri Jamco

menjadi juara kelas 63 kilogram.

“Olahraga tinju mengajarkan kita tentang arti disiplin, kerja keras, pengorbanan, serta ketangguhan mental,” ujar AHY.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Jakarta Benny Erwin mengapresiasi perjuangan petinju DKI. Ia menyebut kerja keras latihan dan kekompakan pelatih serta atlet menjadi kunci. Benny menilai prestasi itu sinyal kebangkitan tinju DKI.

DKI mengoleksi sembilan medali dengan rincian dua emas dan lima pe-runggu Elite. Satu perunggu

berasal dari Youth dan satu perunggu dari Junior. Benny mengingatkan atlet tidak cepat berpuas diri.

“Alhamdulillah, dengan kerja keras latihan dan kekompakan pelatih serta atlet, petinju DKI bisa membawa pulang dua emas di kelas bergengsi,” kata Benny.

Kejurnas menjadi tolak ukur kesiapan fisik, teknik, dan mental atlet. Hasil itu menjadi modal menghadapi Pra-PON menuju PON 2028 di NTB dan NTT. AHY mengajak pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi prestasi tinju.



Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menutup Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko Infrastruktur 2026.

AHY menilai tinju membentuk karakter dan mental generasi muda. Ia mendorong petinju muda mencetak prestasi dan mengibarkan Merah Putih. Kejurnas berlangsung 19–25 Oktober 2026.

“Kita dorong para petinju muda mencetak prestasi terbaik dan bangga mengibarkan bendera Merah Putih di tingkat dunia,” katanya.

Pertandingan berlangsung ketat pada tiga kategori Junior, Youth, dan Elite. Petinju DKI bersaing menghadapi atlet dari 35 provinsi. Sandyarto menang RSC pada ronde pertama melawan petinju Sulawesi Selatan. Jorgi tampil sebagai juara kelas 63 kilogram putra.

“Jiwa kompetisi yang sehat dan sportif seperti inilah yang sangat dibutuhkan generasi muda dalam menghadapi tantangan era modern,” ujar AHY.

AHY menyebut Kejurnas menjadi ruang pembinaan petinju muda. Ia berharap kolaborasi pemangku kepentingan terus diperkuat.

Kejurnas digelar PP Pertina pada 19–25 Oktober 2026. Hasil Kejurnas menjadi tolak ukur menuju Pra-PON 2028. Petinju DKI ini terus berlatih.

“Ini tidak mudah dan prestasi ini menjadi sinyal kuat kebangkitan tinju DKI di tengah tantangan organisasi dan efisiensi anggaran pembinaan prestasi,” kata Benny. (AZM/RMD)



BANPOS CHANNEL



WWW.BANPOS.CO



BANTENPOS@GMAIL.COM



BANTEN_POS



BANTEN POS

DPRD Minta Anggaran Keselamatan Petugas Tak Dipangkas

CILEGON, BANPOS – DPRD Kota Cilegon mendorong pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran kebencanaan dan keselamatan petugas dalam penyesuaian anggaran mendatang. Efisiensi belanja, terutama di tengah keterbatasan keuangan daerah, dinilai tidak boleh mengurangi kesiapan petugas menghadapi kebakaran industri, kecelakaan, maupun kondisi darurat lainnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, mengatakan kebutuhan keselamatan petugas harus menjadi perhatian serius mengingat Cilegon merupakan kota industri dengan risiko kedaruratan yang beragam. Menurutnya, perlindungan tidak cukup diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Petugas yang berada di garis depan penanganan juga membutuhkan peralatan, perlindungan, dan sarana operasional yang memadai. “Keselamatan tidak hanya menyangkut masyarakat yang menjadi korban bencana, tapi para petugas yang berada di garis depan saat melakukan evakuasi dan penye-

lamatan,” kata Sitta, Senin (26/10).

Ia menilai, kebutuhan anggaran keselamatan perlu dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi dan risiko di lapangan. Sejumlah kebutuhan yang harus diperhatikan antara lain alat pelindung diri (APD), peremajaan kendaraan operasional, jaminan perlindungan petugas, serta perlengkapan penyelamatan lainnya.

Sitta mengatakan, pemenuhan kebutuhan tersebut tetap harus mempertimbangkan usulan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kondisi peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan daerah. Namun, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, penambahan anggaran perlu diperjuangkan. “Kalau setelah efisiensi ternyata ada kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, seperti peralatan penyelamatan, maka penambahan anggaran perlu diperjuangkan berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, kesiapan petugas tidak bisa hanya diukur dari kecepatan merespons kejadian. Dukungan peralatan dan perlindungan

kerja juga menentukan kemampuan petugas dalam menangani situasi darurat tanpa mengabaikan keselamatan diri. “Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya, petugas dituntut bergerak cepat dan mempertaruhkan keselamatannya, tetapi dukungan anggarannya tidak memadai,” katanya.

Karena itu, Sitta mendorong Pemkot Cilegon menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan risiko kerja, kebutuhan operasional, serta standar keselamatan yang berlaku. Efisiensi tetap dapat dilakukan, tetapi tidak boleh melemahkan kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana. “Prinsipnya, walaupun sedang efisiensi anggaran, jangan sampai mengorbankan anggaran kebencanaan dan keselamatan petugas,” tegasnya.

Menurutnya, penambahan anggaran bukan semata-mata soal besaran nominal, melainkan memastikan kebutuhan paling mendesak dapat dipenuhi. Dengan begitu, pemerintah daerah tetap me-



DPRD Cilegon tetap mendorong agar anggaran keselamatan dan kebencanaan, Senin (26/10).

iliki kemampuan memadai untuk merespons keadaan darurat.

Selain dukungan anggaran, Sitta meminta Pemkot Cilegon memperkuat koordinasi dengan pengelola

kawasan industri dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kerja sama tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kedaruratan, terutama

di wilayah dengan risiko industri yang tinggi. “Keselamatan petugas dan masyarakat harus menjadi kepentingan kita bersama,” pungkasnya. (CR-03/PAY)



Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Sat Lantas Polres Cilegon, IPDA Doni Yoga P bersama jajarannya sedang melaksanakan Giat Operasi Patuh Maung 2026 pada Senin (26/10).

Operasi Patuh Maung Sasar Tujuh Pelanggaran

CILEGON, BANPOS – Satlantas Polres Cilegon menggelar Operasi Patuh Maung 2026 selama dua pekan, mulai Senin (26/10) hingga 8 November 2026. Operasi ini menasar tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kasatlantas Polres Cilegon AKP Ridwan mengatakan, operasi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, dalam mematuhi aturan lalu lintas. “Secara resmi mulai hari ini giat Operasi Patuh Maung 2026 kita laksanakan. Untuk itu, kita mengimbau kepada pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, untuk selalu tertib dan disiplin saat berkendara. Mari wujudkan lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan, tujuh pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi meliputi penggunaan telepon seluler saat berkendara, pengendara di bawah umur, serta sepeda motor yang berbongcengan lebih dari satu orang.

Sasaran berikutnya adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstan-

dar nasional Indonesia (SNI), pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman (safety belt), pengemudi yang berkendara di bawah pengaruh alkohol, pengendara yang melawan arus, serta pengemudi yang melebihi batas kecepatan.

Operasi Patuh Maung 2026 mengusung tema “Polri Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas saat berkendara.

Sementara itu, Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Cilegon IPDA Doni Yoga P mengimbau masyarakat, khususnya warga Kota Cilegon, agar mematuhi peraturan lalu lintas demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). “Mari bersama-sama menjaga keamanan saat berkendara. Lengkap surat-surat kendaraan dan patuhi peraturan lalu lintas. Keselamatan dimulai dari kesadaran. Mari ciptakan kedisiplinan berkendara demi keselamatan diri sendiri dan sesama,” kata Doni. (BAR/PAY)

Chandra Asri-Polres Cilegon Bangun Sarana Air Bersih di Tiga Lokasi

CILEGON, BANPOS – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) berkolaborasi dengan Polres Cilegon membangun sarana air bersih di tiga lokasi di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Fasilitas tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih lebih dari 400 kepala keluarga (KK), terutama saat musim kemarau.

Corporate Shared Value Department Manager Chandra Asri Group, Wawan Mulyana, mengatakan penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan bersama kepolisian dalam merespons kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional. “Melalui kolaborasi ini, Chandra Asri Group dan Polres Cilegon turut mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketika ketersediaan air bersih menjadi tantangan selama musim kemarau,” ujar Wawan, Senin (26/10).

Tiga lokasi pembangunan sarana air bersih tersebut berada di

Kampung Pegadungan, Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang; Kampung Setu Kidul, Desa Kosambironyok, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang; serta Kampung Baru Nagreg, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Setiap lokasi dilengkapi sumur bor dan tandon air berkapasitas 5.000 liter. Fasilitas ini diharapkan membantu warga memperoleh pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wawan mengatakan, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang perlu dijaga ketersediaannya, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan air pada musim kemarau. “Kami berharap sarana air bersih ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat di tengah kemarau, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga,” katanya.

Tokoh masyarakat Kampung Pegadungan, Aat Supardi, mengapresiasi bantuan sarana air bersih tersebut. Menurut dia, keberadaan

sumur bor dapat membantu masyarakat setempat dan sekitarnya memenuhi kebutuhan air, khususnya saat musim kemarau. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan sarana air bersih melalui kolaborasi Chandra Asri Group dan Polres Cilegon. Dengan ada-

nya sumur bor ini, masyarakat Kampung Pegadungan dan sekitarnya dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama saat musim kemarau. Semoga fasilitas ini bisa terus memberikan manfaat bagi warga,” ujar Aat. (BAR/PAY)



Corporate Shared Value Department Manager Chandra Asri Group, Wawan Mulyana saat menghadiri serah terima bantuan sarana air bersih berupa pembangunan sumur bor untuk masyarakat di wilayah terdekat yakni masyarakat di Kecamatan Anyer Kabupaten Serang dan Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon.

Polisi Periksa 18 Saksi Kebakaran KMP Batu Mandi



Ditpolairud Polda Banten telah memeriksa 18 saksi penyebab insiden KMP Batu Mandi, Jumat (23/10).

CILEGON, BANPOS – Penyebab kebakaran yang berujung tenggelamnya KMP Batu Mandi di perairan Merak-Bakauheni masih diselidiki polisi. Hingga Jumat (23/10), penyidik Direktorat Polisi

Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten telah memeriksa 18 saksi, tetapi belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) karena kondisi bangkai kapal masih panas pascakebakaran.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achies Hutapea mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Selasa (20/10/2026) tersebut. Para saksi berasal dari sejumlah pihak yang berada di kapal saat insiden, mulai dari penumpang, pengemudi bus, Kepala Kamar Mesin (KKM), hingga kru kapal. “Dari teman-teman penyidik Direktorat Polair Polda Banten telah memeriksa 18 orang saksi. Sampai saat ini penyelidikan masih berjalan,” kata Maruli, Jumat (23/10).

Menurutnya, penyidik belum bisa memeriksa langsung lokasi kebakaran karena temperatur badan kapal dan material di dalamnya masih tinggi. Kondisi tersebut dinilai berisiko membahayakan keselamatan petugas apabila olah TKP dipaksakan. “Kondisi temperatur badan kapal dan partikel di dalamnya itu masih cukup panas setelah kebakaran. Kondisi seperti itu dikhawatirkan membahayakan keselamatan petugas apabila

pemeriksaan lokasi terus dipaksakan,” ujarnya.

KMP Batu Mandi dilaporkan tenggelam pada Rabu (21/10/2026), sehari setelah kebakaran terjadi. Penyidik kini menunggu proses pengapungan bangkai kapal agar pemeriksaan di lokasi kejadian dapat dilanjutkan.

Polisi juga belum menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

Kemungkinan keterlibatan pihak tertentu, termasuk nakhoda kapal, masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. “Nanti kita tunggu hasil penyelidikan setelah olah TKP, nanti kita ekspos berikutnya,” kata Maruli.

Hingga kini, penyebab kebakaran yang mengakibatkan kapal tenggelam itu belum diketahui. Polisi masih mengandalkan pemeriksaan saksi dan menunggu kondisi bangkai kapal memungkinkan untuk dilakukan olah TKP guna mengungkap penyebab insiden tersebut. (CR-03/PAY)

LEBIH MUDAH

AKSES INFORMASI BANTEN DI PLATFORM DIGITAL

BANTEN POS

DOWNLOAD SEKARANG

APLIKASI BANTEN POS DI GOOGLE PLAY

GET IT ON Google Play

E- PAPER

PORTAL BERITA

YouTube Channel

Pemprov Gandeng Kejati Atasi Truk ODOL

SERANG, BANPOS - Pemprov Banten menggandeng Kejati Banten mengatasi truk ODOL yang dikeluhkan masyarakat. Kesepakatan bersama diteken di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Senin (26/10). Dukungan kejaksaan diharapkan memperkuat landasan hukum kebijakan daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menyebut persoalan truk ODOL menjadi pekerjaan rumah daerah. Kejati Banten memberi pendapat hukum soal pembatasan waktu operasional kendaraan ODOL. Pembatasan operasional dinilai perlu dasar hukum agar penegakan tidak menimbulkan masalah.

“Selama ini persoalan truk ODOL menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Andra.

Menurut Andra, dukungan kejaksaan memperkuat aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ia berharap sinergi itu membantu daerah mengambil langkah tepat. Pemprov berharap pendampingan hukum mempercepat penyelesaian persoalan truk ODOL.

Kejati Banten selama ini mendampingi pemerintah melalui pertimbangan hukum dan konsultasi. Kepastian hukum dinilai penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sinergi lintas lembaga dinilai memperkuat kepastian hukum dalam pelayanan publik.

“Kejati Banten memberikan pendapat hukum tanpa diminta, sehingga bisa kita tindak lanjuti,” kata Andra.

Kepala Kejati Banten Herry Hermanus Horo menyatakan



Edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami

proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk hak dan kewajibannya

dukungan itu bagian fungsi Jaksa Pengacara Negara. Fungsi itu mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan, dan konsultasi. Kejaksaan juga membuka konsultasi hukum bagi aparat pemerintah daerah.

Herry menjelaskan pendapat hukum tanpa permohonan merupakan kewenangan yang diatur. Ia mendorong jajaran kejaksaan proaktif mendukung pembangunan daerah. Langkah proaktif itu diharapkan mencegah masalah hukum sejak awal.

“Tidak ada aspek kehidupan yang terlepas dari masalah hukum,” kata Herry.

Terkait ODOL, Herry menegaskan pendapat hukum kejaksaan bersifat normatif. Kejaksaan memberi masukan soal langkah hukum, produk hukum, dan mekanisme penegakan. Kejaksaan nilai ODOL ini sesuai aturan.

Kerja sama itu juga membuka ruang konsultasi hukum bagi organisasi perangkat daerah. Aparatur diminta tidak ragu berkonsultasi saat menghadapi persoalan hukum. Ruang konsultasi hukum itu terbuka bagi aparat.

BACA PEMPROV HAL-8



REALISASI PENYALURAN PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN. Petani menebar pupuk di area Persawahan di Mancak, Kabupaten Serang, Senin (26/10). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan multifinance ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Juli 2026 tumbuh 10,12 persen secara tahunan menjadi Rp42,51 triliun, di tengah potensi dampak fenomena El Nino terhadap produktivitas dan keberlangsungan usaha di sektor tersebut.

Gubernur ‘Warning’ Pengembang

Diminta Jangan Abai Fasum

SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan sekaligus memperingatkan agar para pengembang perumahan di Provinsi Banten untuk bertanggung jawab terhadap fasilitas umum (fasum) dan tidak meninggalkan perumahan begitu saja setelah dibangun.

Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri Musda ke-9 DPD Real Estate Indonesia (REI) Banten di hotel Aston Kota Serang, Senin (26/10).

Menurut Andra, Pemprov Banten banyak menghadapi persoalan alih fungsi lahan dari sawah dan rawa menjadi perumahan. Jika pengembang tidak bertanggung jawab, fasum seperti jalan dan drainase akhirnya menjadi PR pemerintah.

“Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kita ini banyak beralih fungsi lahan. Dari tadinya sawah kemudian menjadi rumah, dari

tadinya rawa menjadi rumah. Yang kemudian hari seiring dengan waktu, kalau seandainya pengembangnya ini tidak bertanggung jawab, ditinggal begitu saja, akhirnya jadi PR-nya pemerintah terkait dengan fasilitas umumnya jalan raya dan sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah menjadikan REI dan asosiasi pengembang lainnya sebagai mitra strategis untuk mengejar target pe-

nyediaan perumahan. Terlebih backlog perumahan di Banten masih sangat besar, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi para pengusaha properti.

“Namun saya yakin dan percaya bahwa teman-teman REI adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, sehingga ini patut kita jadikan mitra dalam rangka mengejar target pemerintah

BACA GUBERNUR HAL-8

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG



Pemkot Serang Sasar Beasiswa S2 Bagi Guru

Perluasan Kota Serang Cerdas

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Serang resmi meluncurkan program “Kota Serang Cerdas” untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan secara merata. Program ini tidak hanya berfokus pada alokasi satu sarjana di tiap kelurahan dan satu dokter di tiap kecamatan, tetapi juga menyediakan beasiswa pendidikan jenjang Magister (S2) bagi para guru.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Zeka Bachdi, menyampaikan bahwa program Serang Cerdas menjadi pijakan utama dalam membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Kota Serang.

“Serang Cerdas ini kan pintu awal membuka semua peluang pendidikan yang ada di Kota Serang. Dibuka oleh program Pak Walikota, Serang Cerdas,” ujarnya Peluncuran Serang Cerdas pada Senin (26/10).

Untuk mendukung peningkatan kualitas pengajar, Pemkot Serang menggandeng beberapa perguruan tinggi ternama. Beasiswa jenjang S2 tersebut disalurkan melalui kemitraan strategis yang telah dibangun pemerintah daerah.

“Nanti guru juga yang kita berikan beasiswa, ada



juga guru-guru yang nanti ke depan akan meningkatkan mutu pastinya kita berikan beasiswa, bisa dari UPG, bisa dari Unpam, bisa dari Untirta. Kan tiga hal itu sudah kita kerjasamakan kepada tiga universitas gede itu,” jelasnya.

Mengenai mekanisme penetapan penerima beasiswa guru, Dindikbud Kota Serang bersama tim pengawas akan menerapkan proses verifikasi dan penilaian objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi mengajar.

“Untuk kami Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan guru, guru yang memang dapat beasiswanya itu kami akan melewati satu verifikasi namanya tes kecakapan guru,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa peluncuran program ini dirancang agar memberikan dampak nyata dan berkesinambungan bagi iklim pendidikan di Kota Serang.

“Peluncuran hari ini Serang Cerdas itu bukan saja fokus kepada satu sarjana satu

kelurahan, tapi tentunya berimbas kepada dunia pendidikan. Salah satunya peningkatan mutu pendidikan lewat guru yang akan kita berikan beasiswa,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Serang, Budi Rustandi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan, akademisi, serta pihak swasta yang terus bersinergi mendorong pembangunan di Kota Serang.

“Kolaborasi yang dibangun merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa teknologi di Kota Serang harus memberikan manfaat nyata, seperti pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan berkualitas. Langkah ini diharapkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta pengembangan potensi generasi muda.

“Alhamdulillah, saya dengan Pak Agis genap 20 bulan memimpin. Kita banyak melalui ujian dan rintangan, tetapi kita tetap kuat. Seragam gratis baru saja kita jalankan. Insya Allah untuk program 1 kelurahan 1 Sarjana ini juga tahun ini akan kita laksanakan, dan insya Allah tahun depan 1 Kecamatan 1 Dokter,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Kota Serang Cerdas tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan butuh kerja sama lintas sektor. “Kota Serang Cerdas tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah saja, perlu ada sinergi dengan berbagai pihak. Kita harus membangun budaya kerja yang inovatif, meningkatkan pola kerja yang tidak efektif, dan memastikan setiap inovasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal program ini secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada seremonial belaka. Ia menyoroti peran vital Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kominfo sebagai instansi teknis.

“Kepada seluruh perangkat daerah, saya minta agar peluncuran ini tidak berhenti

pada kegiatan seremonial. Jadikan Kota Serang Cerdas ini sebagai gerakan bersama yang diwujudkan melalui program kerja yang terukur, pelayanannya semakin baik, serta inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Budi.

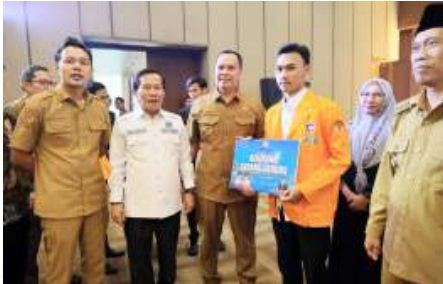
“Untuk teman-teman di Dinas Pendidikan dan Dinkes, jangan menunggu bola tetapi jemput bola. Kominfo nanti yang mengakomodir untuk sosialisasi ke masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu yang memiliki keinginan kuat untuk sekolah dan kuliah,” tambahnya.

Terkait program beasiswa kedokteran, Budi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Serang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan pihak universitas untuk memfasilitasi warga yang berprestasi namun terkendala biaya.

“Masyarakat khusus Kota Serang yang ingin menjadi dokter tetapi tidak ada biaya, mohon difasilitasi. Kita ingin masyarakat Kota Serang ini semakin sejahtera dan generasi muda kita semakin unggul serta berdaya saing,” tuturnya.

Peluncuran program Kota Serang Cerdas ini juga mencatatkan efisiensi anggaran daerah. Seluruh rangkaian kegiatan terselenggara tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri, serta kolaborasi bersama perguruan tinggi.

“Launching hari ini sebenarnya tidak memakai APBD. Di pemerintahan Walikota ini, kita banyak dibantu oleh CSR. Ini semua berkat dorongan agar Kota Serang terus berinovasi dan bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (ADV)



www.disdikbud2.serangkota.go.id



dindikbudkotaserang_



Masyarakat Geruduk Desak Pencopotan

Tolak Sekdes Pengguna Narkoba



SERANG, BANPOS - Sejumlah masyarakat dari Desa Tunjung Desa Kecamatan Tunjungteja menolak keras adanya pecandu narkoba dalam tatanan pemerintahan desa-nya. Masyarakat Kabupaten Serang tersebut mendesak agar pe-

merintah daerah segera melakukan pemberhentikan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) yang tersandung kasus narkoba.

Hal tersebut terbukti dari beredarnya surat atau berita acara penyerahan oknum tersebut kepada

pihak keluarga agar dilakukan rehabilitasi jalan atau rawat jalan.

Perwakilan masyarakat Tunjungteja, Muhidin mengungkapkan bahwa alasan masyarakat menggelar aksi di Kantor Kecamatan Tunjungteja dan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang karena menolak Sekdes yang diduga tersandung kasus narkoba. Seba tindakan tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan warga.

“Tuntutan masyarakat supaya diberhentikan Sekdes karena masyarakat tidak mau dipimpin sama

pengguna narkoba,” ujarnya, Senin (26/10).

Ia menambahkan, desakan warga agar Sekdes tersebut segera diberhentikan sudah sangat mendedesak karena prosesnya dinilai berjalan lambat. Pihaknya bersama tokoh masyarakat dan pihak kecamatan sebelumnya telah mendatangi kantor DPMD Kabupaten Serang untuk menyerahkan surat permohonan pemberhentian.

Namun, permohonan tersebut terkendala masalah kelengkapan administrasi karena bukti surat dari tempat rehabilitasi yang dilampirkan masih berupa fotokopi. Kata dia, pihak DPMD meminta agar dokumen tersebut untuk dilakukan legalisir terlebih dahulu.

“Karena tadi ada kekurangan persyaratan, katanya alasannya harus ada bukti administrasinya. Karena itu tadi ada bukti dari tempat rehabilitasi dan dari yayasan, tapi buktinya fotokopi. Jadi pihak DPMD minta yang dilegalisir sebagai pembuktiannya,” jelas Muhidin.

Meskipun demikian, perwakilan warga memastikan bahwa tuntutan mereka tetap satu, yakni meminta agar proses pemberhentian dapat dipercepat tanpa harus melalui proses penggantian yang berbelit-belit.

“Tuntutannya hanya itu, minta diberhentikan aja secepatnya,” tegasnya.

Sementara, Ketua Karang Taruna Desa Tunjung Teja Ito Sumarta menegaskan bahwa tindakan salah seorang perangkat desa tersebut sudah tidak dapat ditoleransi lantaran dikhawatirkan dapat

memberikan dampak negatif terhadap masyarakat terutama generasi muda.

“Kita tahu persoalan sekdes sudah tidak bisa ditolerir lagi, seorang pegawai desa di grebek polisi di kantor desa, karena diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu,” tegasnya.

Ito Sumarta menegaskan bahwa aksi penolakan masyarakat ini semata-mata demi kepentingan bersama. Ia memastikan bahwa gerakan ini murni dari masyarakat tanpa adanya kepentingan politik dari pihak tertentu.

“Harapan besar kami dari pihak terkait agar bisa secepatnya memberhentikan sekdes tersebut, ini murni gerakan masyarakat tidak ada kepentingan politik,” ujarnya.

Sementara, Kepala Desa Tunjung Teja Endang Mubarak mengatakan aksi tersebut bagian dari pada demokrasi penyampaian pendapat di muka umum. Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut secara berjenjang.

“Iya, kalau tuntutan dari masyarakat, sekdes itu diberhentikan dari perangkat desa. Kita juga sudah mengirimkan pengajuan ke kecamatan, terus kecamatan ke DPMD. Nah, ini sekarang prosesnya sedang di DPMD, sedang ditelaah apakah memenuhi bahwa sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Karena bicaranya kan harus ada administrasi yang bisa membuktikan terduga ini sebagai pengguna narkoba,” ujarnya.

Meski perangkat desa berkurang satu, Endang memastikan bahwa

pelayanan dan roda pemerintahan di desa tidak sampai terbengkalai. Menurutnya, sistem kerja di desa dijalankan secara kolektif kolegal.

“Kalau terkait soal pekerjaan di desa, alhamdulillah, dikarenakan kita walaupun ada jobdesk-nya masing-masing, kalau di desa sifatnya kolektif kolegal. Alhamdulillah, tidak ada pekerjaan yang terbengkalai seperti itu,” tambahnya.

Dia juga menerangkan bahwa masyarakat mendesak agar pencopotan perangkat desa itu dilakukan dalam kurun waktu dua kali 24 jam. Ia menyebutkan bahwa persoalan ini langsung pihaknya dilimpahkan ke DPMD serta bagian hukum. Namun, kata dia, pihak DPMD belum dapat memastikan tenggat waktu putusan karena masih harus menelaah berkas administrasi dan prosedur hukum yang berlaku.

“Ketika di DPMD, pihak DPMD hanya bisa menerima berkas administrasi yang diserahkan oleh desa melalui kecamatan, nah nanti diserahkan ke bagian hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Endang mengungkapkan bahwa hingga saat ini status Sekdes yang bersangkutan masih aktif dan belum ada pemberhentian sementara maupun rotasi. Ia juga tidak menampik adanya warga yang mempertanyakan kehadiran Sekdes di lingkungan Pemerintahan Desa yang kini statusnya disebut sedang menjalani rehabilitasi.

“Kalau status sekarang masih aktif. Karena posisinya tidak ada penghentian sementara dan rotasi,” tandasnya.(MPD/AZM)



Anwar-Jejen Nahkodai Pokja Wartawan Banten 2026-2029

BOGOR, BANPOS - Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Hari dan Elektronik Provinsi Banten menggelar Kongres VIII yang digelar di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10).

Dalam agenda pemilihan ketua tiga tahunan ini, Khaerul Anwar dan Muhammad Jejen terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk periode 2026-2029.

Usai kegiatan, Khaerul Anwar menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota, senior, dan jajaran organisasi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya bersama Jejen untuk memimpin Pokja Wartawan Hari dan Elektronik Provinsi Banten selama tiga tahun ke depan.

“Terima kasih kepada senior dan kawan-kawan semua yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan Jejen untuk menahkodai organisasi ini,” ujar Anwar.

Ia berharap dukungan dan kebersamaan seluruh anggota terus terjaga agar berbagai program kerja yang direncanakan dapat direalisasikan. Program tersebut, kata dia, nantinya akan dibahas bersama jajaran kepengurusan sebagai tindak lanjut.

Menurutnya, sinergi seluruh anggota menjadi kunci untuk

mewujudkan visi dan misi organisasi serta membawa Pokja Wartawan Hari dan Elektronik Provinsi Banten menjadi organisasi yang semakin baik.

“Kami berharap visi dan misi ini dapat diwujudkan dengan bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Hari dan Elektronik Provinsi Banten periode 2023-2026, Deni Saprowi, menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus, anggota, dan para senior yang telah mendukung pelaksanaan program kerja selama masa kepemimpinannya.

Pria yang akrab disapa Saprol itu mengapresiasi kebersamaan seluruh elemen organisasi hingga berakhirnya masa kepemimpinan.

“Terima kasih kepada pengurus, anggota, dan para senior yang telah kebersamai kami hingga demisioner,” ujarnya.

Saprol menegaskan, profesi jurnalis menjadi ikatan yang menyatukan seluruh anggota, sementara Pokja Wartawan Hari dan Elektronik Provinsi Banten merupakan rumah bersama bagi para jurnalis.

“Kita dikumpulkan oleh profesi dan pokja menjadi rumah kita bersama, terima kasih,” katanya.(MPD/AZM)

Pemprov Gandeng...

Sambungan dari Halaman 7

“Edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk hak dan kewajiban,” tandasnya.

Herry menilai dinamika pemerintahan membutuhkan komunikasi dan konsultasi hukum responsif. Langkah itu mencegah kesalahan administrasi dan pelanggaran hukum sejak awal.

Gubernur menegaskan kepastian hukum penting bagi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Setiap kebijakan pembangunan harus dirancang benar dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Karena setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan benar, dilaksanakan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.(MPD/AZM)

Pembatasan Akses InfoPKB Rentan Gerus Kepatuhan WP

SERANG, BANPOS - Pengamat Kebijakan Publik, Muslih Amin menilai bahwa langkah Pemprov Banten melakukan pembatasan akses data pada portal Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (InfoPKB) Provinsi Banten rentan menggerus tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajak jika tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Dia menegaskan bahwa transparansi informasi jauh lebih krusial untuk menjaga fungsi pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah. “Pembatasan dapat dimaklumi jika tujuannya untuk melindungi data masyarakat. Namun perlu dilihat secara serius betulkah itu alasannya atau ada unsur lain. Disisi lain, keterbukaan informasi publik lebih penting, terutama menyangkut fungsi pengawasan dan akuntabilitas semua pihak, termasuk informasi data kendaraan dinas,” ujar Muslih, Senin (26/10).

Ia mengingatkan agar Pemprov Banten dalam hal ini Bapenda tidak gegabah dalam merumuskan aturan. Terlebih, kata dia, hal yang menyangkut ranah perpajakan daerah. “Pembatasan dapat dimaklumi jika tujuannya untuk melindungi data masyarakat. Namun perlu dilihat secara serius betulkah itu alasannya atau ada unsur lain. Disisi lain, keterbukaan informasi publik lebih penting, terutama menyangkut fungsi pengawasan dan akuntabilitas semua pihak, termasuk informasi data kendaraan dinas,” ujar Muslih, Senin (26/10).

Ia mengingatkan agar Pemprov Banten dalam hal ini Bapenda tidak gegabah dalam merumuskan aturan. Terlebih, kata dia, hal yang menyangkut ranah perpajakan daerah.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat bergantung pada tingkat keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah.

“Pemprov harus lebih bijak dalam membuat aturan, apalagi menyangkut isu pajak, masyarakat harus diberikan akses dan keleluasaan untuk berpartisipasi. Jika pengetahuan informasi tetap dibelakan tanpa justifikasi dan edukasi memadai, dikhawatirkan praktik antisipasi dan kecurigaan publik yang ujungnya trust (kepercayaan) makin menurun dan kepatuhan pajak makin rendah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muslih menyoroti latar belakang lahirnya kebijakan pembatasan yang disinyalir bermula dari adanya pengaduan penyalahgunaan data. Menurutnya, pemblokiran atau pembatasan akses secara menyeluruh bukanlah langkah yang bijak, karena hal itu justru merugikan masyarakat umum yang tidak bersalah.

“Pembatasan dengan alasan berawal adanya pengaduan penyalahgunaan, maka mestinya pelanggaran tersebut yang ditindak, bukan dijawab dengan kebijakan yang

membuat pihak yang tidak bersalah ikut menanggung,” tambahnya.

Sebagai solusi, Muslih meminta agar Bapenda segera memberikan klarifikasi mengenai landasan hukum atas kebijakan yang diambil, sekaligus membuka ruang akses informasi yang proporsional bagi masyarakat.

“Sebaiknya Bapenda perlu menjelaskan dasar hukum, kebijakan yang diambil dan konsekuensinya. Di sisi lain, perlu ada mekanisme yang tetap memberi ruang bagi publik untuk mengakses, sekaligus Bapenda terus update perkembangan pengelolaan pajak kendaraan. Prinsipnya data pribadi perlu dilindungi namun akuntabilitas tidak boleh dihalangi,” tandasnya.

Diketahui, website info-pkb.bantenprov.go.id kini tidak lagi dapat diakses dengan mudah. Hal itu dikarenakan pada website tersebut mewajibkan pengguna untuk memasukkan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan.

Penggunaan untuk mengisi 5 digit terakhir nomor rangka tersebut diketahui hanya berlaku pada sistem informasi PKB Banten saja.

Gubernur 'Warning'...

Sambungan dari Halaman 7

untuk ketersediaan rumah di Provinsi Banten,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan selamat atas pelaksanaan Musda ke-9 REI Banten dan berharap musda berjalan baik.

“Semoga Musda-nya berjalan dengan baik. Dan bagi kami pemerintah, keberadaan developer, organisasi apapun tidak hanya REI, tentu kami menjadikan mitra,” ujarnya.

Andra memastikan Pemprov Banten akan memberikan dukungan agar industri perumahan terus tumbuh, mengingat sektor ini masih menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Insyaallah kita akan berikan dukungan semestinya agar industri

perumahan di Provinsi Banten itu terus berkembang, karena sampai saat ini industri perumahan masih salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten,” paparnya.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, mengapresiasi Gubernur Banten Andra Soni terhadap perizinan, kejelasan lahan, serta dukungan kebijakan bagi sektor properti.

Joko menyatakan sektor properti berperan dalam mendukung perekonomian dan penyediaan hunian bagi masyarakat, sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah.

Terpisah, Sekretaris DPD REI Banten, Finndy Wong, mengatakan dari total pembangunan perumahan di Banten, estimasi persen-

tase rumah yang berujung pada pengambilalihan kembali oleh pihak bank terbilang relatif kecil, yaitu tak sampai 10 persen.

Jika dihitung pada rata-rata kuota dan realisasi KPR subsidi di Banten yang berkisar 10.000 hingga 18.000 unit setiap tahun, maka diperkirakan ratusan hingga 1.500 unit per tahun mengalami gagal bayar atau tidak memanfaatkan.

“Kalau dari persentase sebenarnya tidak sampai 10 persen,” katanya. Jika diasumsikan dalam satu kompleks perumahan subsidi rata-rata dibangun 500 unit, maka unit yang tidak terjual atau mengalami gagal bayar diperkirakan berada di bawah 50 unit per perumahan.

“Ya, memang angka tersebut bervariasi bergantung pada skema pengawasan pengembang atau

developer,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran beberapa faktor, diantaranya dinamika ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan kondisi finansial debitur yang memicu adanya unit-unit rumah subsidi yang akhirnya ditarik kembali oleh pihak bank.

Maka dari itu, REI Banten mendukung langkah pemerintah dan perbankan untuk mengambil alih, merenovasi, dan menjual kembali rumah subsidi bekas secara legal dan resmi.

“Daripada rumah-rumah itu terbengkalai, tentu lebih baik jika direnovasi ulang oleh pihak perbankan lalu dijual kembali. Ini jadi peluang bagus bagi masyarakat yang butuh KPR subsidi,” tuturnya.(MPD/AZM)



Oknum Diduga...

Sambungan dari Halaman 1

Senin (26/10).

Ia menduga, selama menjalan-kan usaha, PWI kemungkinan menghadapi gangguan dari oknum tertentu yang berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabu-paten Lebak.

“Mungkin saja mereka berbisnis ada gangguan-gangguan dari ok-num sehingga berdampak pada iklim investasi yang menjadi tidak kondusif. Jadi bukan hanya soal kontrak dengan pemilik pabrik ha-bis, bukan karena itu tapi banyak

Gaji Guru...

Sambungan dari Halaman 1

Indonesia (PGRI) Kota Cilegon meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pembayaran hak para guru tersebut.

Ketua PGRI Kota Cilegon Bah-rudin mengatakan, pihaknya me-mahami keresahan para guru yang harus menunggu pembayaran gaji, terlebih bagi mereka yang meng-andalkan penghasilan bulanan untuk memenuhi kebutuhan ru-mah tangga. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pen-didikan dan Kebudayaan (Din-dikbud) Kota Cilegon untuk men-cari informasi mengenai penyebab keterlambatan tersebut.

“Pada prinsipnya kami mema-hami apa yang menjadi keresahan guru. Namun, kami juga tetap mencari informasi mengenai ke-terlambatan gaji guru,” katanya, Senin (26/10).

Bahrudin berharap pembayaran gaji yang tertunda dapat segera direalisasikan. Ia juga meminta agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi sehingga para guru dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang.

“Kami berharap pembayaran gaji ini bisa secepatnya terealisasi, dan ke depannya tidak ada lagi terulang keterlambatan seperti ini,” harapnya.

Ia mengakui, kondisi tersebut dapat menambah beban para gu-ru. Terutama mereka yang memi-liki kebutuhan mendesak dan bergantung pada gaji untuk mem-biayai keperluan sehari-hari.

“Kami memahami kondisi ini, apalagi bagi guru yang tengah menghadapi kebutuhan mende-sak dan bergantung pada gaji bulanan untuk mencukupi keper-luan rumah tangga,” ujarnya.

Untuk menelusuri persoalan tersebut, Bahrudin mengaku telah meminta informasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Penda-patan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. Berdasarkan infor-masi yang diperolehnya, dana un-

Vox Populi...

Sambungan dari Halaman 1

di berbagai daerah yang berulang kali menemukan pengunjungan yang positif mengonsumsi zat terlarang.

Semakin maraknya penyalah-gunaan narkoba, menjadi salah satu janji penting bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Bahkan Su-yudi yang pernah menjabat sebagai Kapolda Banten berjanji dalam seratus hari pertama kerjanya men-janjikan tiga hal. Pertama, menja-dikan ruang publik lebih aman, kedua, memberantas dan memu-lihkan kawasan dari peredaran narkoba, dan yang ketiga, membe-rantas judi daring dan penipuan digital.

Komitmen akan memberikan rasa aman dan nyaman dan bebas narkoba disambut baik masyara-kat. “Semoga saja apa yang menjadi visi dan misi Bapak Suyudi sebagai Kapolri direalisasikan. Sekarang ini, nyata dipertontonkan di hada-pan kami-kami, masyarakat yang mengandalkan ketentraman dan ketertiban kepada aparat penegak hukum,” kata Salman (45), warga Serdang Kabupaten Serang ini.

Salman yang berprofesi sebagai sopir angkutan karyawan di salah satu perusahaan di Kota Cilegon mengaku khawatir dengan penya-lahgunaan narkoba yang ada di wi-layahnya. lantaran masih banyak THM beroperasi secara terang-te-rangan. “Setiap hari saya merasa risih kalau lagi jemput atau meng-antar karyawan. Di Sepanjang ja-lur Jalan Lingkar Selatan (JLS) per-batasan Kota Cilegon dan Kabupa-ten Serang, banyak THM,” katanya. Bahkan tempat- tempat tersebut ramai pada akhir pekan, malam Sabtu dan malam Minggu. “Yang bikin saya resah, tempat dugem (THM) di JLS itu pengunjungnya anak-anak muda. dan tempat itu tambah ramai dan berisik kalau hari libur,” ujarnya.

Selain berkendara roda dua dan roda empat, umumnya pengun-jung yang datang ke THM di JLS umumnya dari luar daerah. “Kalau saya perhatikan untuk pengun-jung yang bawa mobil kebanyakan

sudut pandang,” ungkap Hasbi.

Menurut Hasbi, kepastian pene-gakan hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upa-ya tersebut dinilai perlu dilakukan bersama aparat penegak hukum agar Kabupaten Lebak tetap me-narik bagi investor.

Di sisi lain, Hasbi menegaskan, pemerintah daerah akan menga-wal pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubung-an kerja (PHK) akibat berhentinya operasional PWI 6.

“Kita harus bersama-sama de-

tuk pembayaran gaji tersedia, te-tapi pencairannya tetap harus meng-ikuti mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan karena adanya kesengajaan dari Pemerintah Kota Cilegon untuk menunda hak para guru.

“Keterlambatan ini dari Pemkot tidak ada niatan mengulur atau menunda pengajiannya. Se-belumnya kami sudah berkomuni-kasi dengan Dindikbud terkait keterlambatan ini,” paparnya.

Bahrudin juga menyebutkan bahwa penyaluran gaji guru PPPK Paruh Waktu tetap dilakukan me-lalui Bank Jabar Banten (BJB). Mes-ki pembayaran belum terealisasi, ia mengaku tidak khawatir hak para guru tersebut tidak dibayarkan.

“Kami tidak ada kekhawatiran gaji tidak dibayarkan. Kami sudah telusuri bahwa uangnya ada dan harus mengikuti mekanisme yang berlaku,” turnya.

Di sisi lain, Bahrudin menilai besaran gaji Rp2 juta yang tengah diberlakukan bagi guru PPPK Paruh Waktu masih belum sesuai dengan harapan. Kendati demik-ian, nominal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan peng-hasilan sebelumnya yang sebesar Rp675 ribu, kemudian naik men-jadi Rp1,5 juta.

“Kalau gaji dua juta masih jauh dari harapan. Sebelumnya, guru paruh waktu sempat mendapatkan enam ratus tujuh lima ribu, lalu menjadi satu juta lima ratus. Kalau dibilang kurang, ya kurang, tetapi mau bagaimana lagi,” tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, PGRI Kota Cilegon berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan proses pencairan gaji yang tertunda agar tidak semakin membebani para guru. Di sisi lain, kepastian waktu pembayaran menjadi hal penting agar para guru PPPK Pa-ruh Waktu dapat memenuhi ke-butuhan rumah tangga sekaligus menjalankan tugas pendidikan tanpa dibayangi ketidakpastian penghasilan.(CR03/ENK)

plat B Jakarta, kalau motor ber plat A, Banten,” ujarnya.

Keresahan Salman terhadap THM di JLS, tentunya beralasan. Hampir setiap malam kerap ada saja keributan karena pengaruh narkoba dan alkohol. “Saya sangat sering melihat pemuda yang ke-luar dari tempat hiburan berteriak-teriak, dan mukanya merah karena habis minum alkohol” ujarnya.

Salam juga sering melihat sosok wanita yang digotong, karena le-mas tidak bisa berjalan. “Bukan ra-hasia umum lagi, kalau tempat hi-buran atau dugem tidak bisa di-pisahkan dari narkoba, dan ini sangat jelas, banyak sekali mereka yang keluar dari tempat dugem dalam kondisi tubuh lemas, dan bicaranya ngelantar,” ujarnya.

Harapan Salman, dengan janji Kapolri Indonesia bebas dari Nar-koba, juga diterapkan di kawasan JLS. “Semoga saja daerah ini (Ban-ten) tidak ada lagi mereka yang mabuk alkohol dan konsumsi nar-koba,” harapnya.

Keinginan bebas dari Narkoba dan menciptakan rasa aman dan nyaman juga disampaikan warga Kota Serang, Rina (40). Ibu dua anak yang mengelola rumah ma-kan ini terkejut, ketika dirinya ber-belanja di salah satu pasar tradi-sional. Ada kios tertutup rapat dengan ukuran besar, membuka tempat karaoke.

“Dua minggu lalu, saya pergi belanja ke pasar sebelum sholat subuh, dan saya terkejut, melihat banyak orang pemuda-pemudi keluar dari kios yang berdekatan dengan pedagang daging merah, dengan tampak seperti orang mabuk, karena pengaruh alkohol,” jarnya.

Dan berdasarkan penjelasan dari para pedagang di pasar terse-but, ternyata kios-kios yang ditutup rapat, bukan hanya sekedar tempat karaoke biasa, melainkan tempat hiburan malam yang didalamnya ada disc jockey (DJ) dan menyed-iakan minuman alkohol.

“Saya merasa aneh saja, dite-ngah pasar besar ini ada tempat dugemnya,” ungkapnya. *

ngan penegak hukum. Dalam kon-teks PWI ini, tentu hak-hak karya-wan yang di-PHK harus dipenuhi dan saya pastikan pemerintah daerah mengawal agar hak tenaga kerja dipenuhi,” ucapnya.

Sementara itu di sisi lain, tu-tupnya PT PWI 6 di Rangkasbitung berdampak besar bagi kehidupan mantan karyawannya. Salah satu yang merasakan dampak tersebut adalah Elsa Mariana Hutami (24).

Setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal Oktober 2026, perempuan asal Kampung Sampay Sarageni, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung-gunung, Kabupaten Lebak, itu kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Elsa membantu ibunya menger-jakan pekerjaan rumah tangga se-kaligus mengasuh anak yang di-titipkan kepada sang ibu. Aktivitas tersebut mengisi hari-harinya setelah kehilangan pekerjaan yang selama satu tahun delapan bulan menjadi sumber penghasilannya.

Peserta BPJS...

Sambungan dari Halaman 1

melainkan kepercayaan peserta terhadap layanan yang setiap bu-lan mereka biayai melalui iuran. Sementara BPJS Kesehatan Ca-bang Serang memastikan pemba-yaran klaim kepada rumah sakit (RS) hingga saat ini berjalan lancar dan dilakukan tepat waktu.

Ketua Umum HMI-MPO Ca-bang Serang, Surya Hadil Umami, menilai keluhan tersebut perlu ditanggapi serius. Pengalaman pe-serta yang memilih membeli obat secara mandiri karena merasa lebih yakin terhadap hasil pengo-batannya menunjukkan adanya persoalan pelayanan yang tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan.

“Bagi peserta BPJS mandiri, iuran merupakan kewajiban yang tetap harus dipenuhi. Karena itu, ketika peserta merasa harus kem-bali mengeluarkan uang untuk membeli obat di luar layanan yang digunakannya, muncul pertanyaan mendasar mengenai kualitas pelayanan dan perlindungan hak peserta,” kata Surya kepada BAN-POS, Senin (26/10).

Ia mempertanyakan dugaan habisnya anggaran untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat atau peserta. Menurutnya, kondisi ter-sebut sangat memprihatinkan dan dapat menciderai amanat undang-undang dasar.

Ia menjelaskan, jika peserta telah membayar iuran, tetapi kemudian memilih mengeluarkan biaya tambahan karena merasa obat yang diterima tidak sesuai harapan, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai masyarakat menanggung beban ganda: tetap membayar iu-ran jaminan kesehatan, sekaligus mengeluarkan biaya pribadi ka-rena tidak percaya pada layanan yang diterimanya.

“Dalam persoalan ini, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan prosedur administratif. Peserta juga berhak mendapatkan penje-lasan yang mudah dipahami me-ngenai obat yang diresepkan,

Dua Proyek...

Sambungan dari Halaman 1

melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2026. Proyek Pema-ngunan Infrastruktur Penunjang Hunian Tetap Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Sumur, memiliki nilai anggaran Rp841.750.000. Semen-tara proyek serupa di Desa Taman Jaya dianggarkan sebesar Rp1.294.126.800.

Kedua paket pekerjaan itu dise-but dikerjakan oleh CV Arrahji Bussiness. Salah satu item peker-jaannya adalah pemasangan U-Ditch yang berfungsi sebagai salu-ran drainase.

Menanggapi hal tersebut, A Iswandi, pemerhati pembangunan Provinsi Banten, mengatakan, pemasangan saluran tanpa lapisan dasar yang sesuai desain berpo-teni menimbulkan persoalan apabila tanah di bawahnya tidak memiliki daya dukung yang me-madai. Kondisi tersebut, katanya,

Pelajar Banten...

Sambungan dari Halaman 1

Pada kejuaraan yang digelar di Ciracas Sports Hall, Jakarta, 16-18 Oktober tersebut, Tb Arya turun di kategori Cadet Kumite -63 Kg Putra dan berhasil membawa pulang medali perunggu.

Orang tua Tb Arya, Yuyun Yus-tiana, mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian putranya yang mampu bersaing dengan

Dia menceritakan pengalaman-nya selama bekerja di perusahaan manufaktur alas kaki tersebut. Ia mengaku mendapatkan pengha-silan sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan, terutama ketika mendapat tambahan upah dari lembur. “Penghasilan alham-dulillah, lebih dari UMR kalau ada lemburan,” ujarnya.

Bekerja di PWI 6 menjadi ke-mempatan bagi Elsa untuk mem-peroleh penghasilan sendiri tanpa harus bekerja jauh dari kampung halaman. Sebelumnya, ia sempat bekerja di Jakarta.

Meski pekerjaan di pabrik cukup menguras tenaga, Elsa mengaku menikmati masa kerjanya. Ia juga tidak merasa memiliki persoalan berarti selama bekerja di perusa-haan tersebut. “Pertama capek ya pasti. Kedua, *have fun* aja sih sebenarnya,” katanya.

Namun, aktivitas kerja itu ber-akhir setelah operasional pabrik dihentikan. Elsa memperkirakan dirinya terkena PHK sekitar 5–6

jumlah yang diberikan, aturan penggunaannya, serta langkah yang harus dilakukan ketika kon-disi belum membaik,” tegasnya.

Ia menerangkan, jika benar ter-dapat obat yang diberikan tidak se-suai resep atau jumlah yang se-mestinya, persoalan itu harus di-periksa secara terbuka. Begitu pula jika pasien belum sembuh setelah menjalani pengobatan, tenaga kesehatan perlu memastikan apa-kah dibutuhkan evaluasi diagno-sis, penyusulan terapi, atau pe-meriksaan lanjutan. Pasien tidak semestinya dibiarkan menebak-nebak sendiri penyebab pengo-batan yang dirasakannya tidak berhasil.

HMI-MPO Cabang Serang juga perlu melihat persoalan ini dalam kerangka pelayanan publik. Jamin-an kesehatan bukan sekadar pro-gram dengan jumlah peserta yang besar atau kepesertaan yang ter-catat aktif.

“Ukuran pentingnya adalah apakah masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang layak, informasi yang transparan, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan ditindaklanjuti,” papar Surya.

Surya menegaskan, keluhan pe-serta semestinya tidak dipandang sebagai persoalan individual be-laka. Pengaduan perlu dicatat, di-periksa, dan ditindaklanjuti ber-dasarkan bukti. Jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan, pihak terkait harus menjelaskan langkah perbaikannya. Sebalik-nya, apabila keluhan muncul akibat kesalahpahaman mengenai obat atau proses pengobatan, pen-jelasan yang memadai tetap harus diberikan kepada pasien.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga perlu memastikan bahwa pe-serta mengetahui jalur pengaduan ketika menemukan ketidaksesuai-an pelayanan. Fasilitas kesehatan harus terbuka terhadap evaluasi, sementara tenaga medis perlu menyampaikan informasi yang benar agar pasien tidak mengam-bil kesimpulan bahwa obat yang ditanggung BPJS pasti lebih buruk

dapat meningkatkan risiko penu-runan atau pergeseran elemen saluran, perubahan kemiringan, hingga tergangunya aliran air. “Namun, besarnya risiko pada kedua lokasi perlu dibuktikan me-lalui pemeriksaan teknis,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu pe-doman yang relevan untuk ditelaah adalah Pedoman Desain Drainase Jalan Nomor 15/P/BM/2021 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Surat Edaran Nomor 23/SE/Db/2021. Pedoman tersebut, ungkap Iswandi, meng-atur pertimbangan dan ketentuan teknis perencanaan drainase jalan, termasuk desain saluran terbuka dan tertutup. “Penerapannya pada kedua proyek ini perlu dipastikan berdasarkan fungsi pekerjaan dan dokumen kontrak yang berlaku,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, DPRKP Banten sebagai perangkat daerah yang menganggarkan kegiatan tersebut perlu menjelaskan stan-dar teknis yang digunakan, terma-

atlet karate dari berbagai negara.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga. Ini hasil kerja keras Arya selama latihan. Persaingan di Senkaido Interna-tional Open ini sangat ketat karena diikuti atlet dari berbagai negara, tapi Arya bisa membuktikan dan meraih juara 3,” ujar Yuyun kepada BANPOS, Senin (26/10).

Yuyun mengatakan, prestasi ini menjadi motivasi bagi Tb Arya un-

Oktober 2026. Sejak kehilangan pekerjaan, Elsa belum menentu-kan langkah untuk kembali beker-ja. Ia masih menjalani aktivitas di rumah sambil membantu ibunya mengurus pekerjaan rumah tang-ga dan mengasuh anak.

“Belum kepikiran aja,” ujarnya saat ditanya mengenai rencana mencari pekerjaan baru.

Meski belum berencana mela-mar pekerjaan dalam waktu dekat, Elsa tidak menutup kemungkinan kembali bekerja di lokasi pabrik tersebut apabila tersedia kesem-patan. Ia mendengar kabar bahwa sejumlah mantan pekerja berha-rap bisa kembali bekerja jika nantinya ada perusahaan baru yang beroperasi di lokasi itu.

Bagi Elsa, kesempatan tersebut bisa menjadi jalan untuk kembali memperoleh penghasilan. Na-mun, hingga kini, ia belum me-nentukan kapan akan mulai men-cari pekerjaan atau perusahaan yang akan dituju.

Pengalaman kehilangan peker-

daripada obat yang dibeli secara mandiri.

“Persoalan ini membutuhkan respons konkret, bukan sekadar penegasan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai aturan. Kepercayaan peserta hanya dapat dipulihkan apabila keluhan ditangani secara serius, standar pelayanan dijalan-kan, dan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Bagi masyarakat, lanjutnya, ja-minan kesehatan seharusnya menjadi perlindungan ketika sakit, bukan sumber kebingungan yang mendorong mereka mengelu-arkan biaya tambahan tanpa mema-hami alasannya. Keluhan minge-nai obat di Kota Serang dan wila-yah Banten perlu menjadi mo-mentum bagi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk meme-riksa kembali kualitas komunikasi, ketepatan pemberian obat, serta penanganan pengaduan peserta.

“Sebab, ketika peserta terus membayar iuran tetapi merasa harus mencari jalan sendiri untuk memperoleh pengobatan yang dipercaya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepuasan pasien, melainkan juga kepercayaan pu-blik terhadap sistem jaminan ke-sehatan,” tandasnya.

Terpisah, BPJS Kesehatan Ca-bang Serang memastikan pemba-yaran klaim kepada rumah sakit (RS) hingga saat ini berjalan lancar dan dilakukan tepat waktu. Kon-disi tersebut menjadi penegasan di tengah beredarnya informasi mengenai keterbatasan obat dan kebijakan internal sejumlah fasili-tas kesehatan (faskes) yang dise-but-sebut membatasi pelayanan kepada peserta Jaminan Kese-hatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Manna, mengatakan, per-soalan keterbatasan obat dan pembatasan kunjungan berobat tidak bisa langsung dikaitkan dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan tanpa adanya verifikasi terhadap fakta di lapangan. Ia me-negaskan, hingga saat ini tidak ada kendala dalam pembayaran klaim rumah sakit. Seluruh pembayaran

suk apakah kondisi tanah di kedua lokasi telah diperiksa sebelum pemasangan U-Ditch dilakukan. “Penjelasan juga diperlukan me-ngenai peran konsultan pengawas dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai gambar dan spesifikasi kontrak,” kata Iswandi.

Selain itu, dia meminta, pihak pelaksana memberikan ketera-ngan mengenai metode pemasan-gan yang digunakan, serta dasar teknis tidak digunakannya pasir urug atau lantai kerja. Menurut-nya, klarifikasi tersebut penting untuk memastikan apakah meto-de di lapangan merupakan bagian dari desain yang disetujui atau ter-dapat pekerjaan yang perlu dieva-luasi.

“Dengan nilai anggaran gabu-ngan mencapai Rp2,13 miliar, kesesuaian mutu dan metode pe-laksanaan kedua proyek perlu di-pastikan melalui pemeriksaan do-kumen serta kondisi fisik peker-jaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Aip Sodik, Pelak-

jaan juga membuat Elsa berharap pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama para pekerja yang ter-dampak penutupan pabrik.

Menurut dia, ketersediaan lapa-ngan kerja akan membantu ma-syarakat yang kehilangan peker-jaan untuk kembali mendapatkan penghasilan.

“Lebih baik didorong sih. Per-banyak lapangan kerja juga supaya gampang nyari kerja,” kata Elsa.

Penutupan operasional PWI 6 di Rangkasbitung pada Oktober 2026 berdampak terhadap sekitar 1.000 pekerja. Kondisi tersebut turut menjadi tantangan bagi penyerap-an tenaga kerja di Kabupaten Le-bak.

Sementara itu, Elsa masih men-jalani kesehariannya di rumah sembari membantu sang ibu. Setelah kehilangan pekerjaan yang memberinya penghasilan rutin, ia belum menentukan langkah untuk kembali memasuki dunia ker-ja.(TQS/ENK)

berjalan lancar dan dilakukan tepat waktu.

“Dan sampai saat ini tidak ada kendala dalam pembayaran ke RS, semua lancar dan dibayarkan te-pat waktu. Jadi, tidak ada alasan jika obat terbatas atau ada pem-batasan internal faskes,” ujar Man-na kepada BANPOS, Senin (26/10).

Menurutnya, kondisi penda-naan Program JKN dan keterse-diaan obat di fasilitas kesehatan merupakan dua persoalan yang tidak bisa langsung disimpulkan memiliki hubungan sebab-akibat. Manna mengakui, keberlanjutan pendanaan Program JKN memang menjadi perhatian bersama.

Pemerintah juga telah meng-ambil langkah penguatan pendanaan untuk mendukung keberlangsung-an program serta pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa keterbatasan obat maupun pem-batasan kunjungan pasien dise-babkan oleh kesulitan keuangan BPJS Kesehatan.

“Memang, keberlanjutan pen-danaan Program JKN menjadi per-hatian bersama. Pemerintah juga telah mengambil langkah pe-nguatan pendanaan untuk men-dukung keberlangsungan program dan pembayaran klaim fasilitas kesehatan,” katanya.

Terkait persoalan ketersediaan obat, Manna menjelaskan, penye-babnya perlu dipastikan melalui koordinasi dengan fasilitas kese-hatan. Hal itu penting untuk mengetahui apakah kendala yang terjadi berkaitan dengan proses pengadaan, distribusi, atau penge-lolaan stok obat di masing-masing fasilitas kesehatan.

Ia menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen menjaga keberlang-sungan Program JKN sekaligus memastikan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai hak-nya. “Komitmen kami adalah menjaga keberlangsungan Pro-gram JKN sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya,” pung-kasnya.(ACG/MYU/ENK)

sana Teknis dari kedua kegiatan tersebut mengatakan bahwa teknis pekerjaan pemasangan U-Ditch sudah dengan sesuai metode dan Rencana Mutu Pekerjaan Kon-struksi (RMPK) penyedia.

“Karena mereka (kontraktor, red) bekerja sesuai dengan kon-trak, tidak bunyi hanya di KAK,” jelasnya melalui pesan WhatsApp, kemarin (26/10).

Aip meminta kepada wartawan untuk konfirmasi langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari kegiatan tersebut, Suhadi. Hal ini, lanjutnya, akan disampaikan kepada PKK. “Saya juga sedang menunggu beliau (Suhadi, red). Kebetulan sekarang beliau sedang rapat di Aston. Nanti disampai-kan,” ucapnya.

Terkait drainase yang buntu, Aip mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai. “Kalau drainase ga buntu. Nanti kita akan cek dan diinstruksikan penyedia untuk dirapikan dan diselesaikan,” ujarnya.(PAY/ENK)

kasih kepada pihak sekolah Al-Qudwah dan pelatih yang selama ini telah memberikan dukungan penuh, baik dalam akademik mau-pun non-akademik. “Terima kasih kepada SMP Al-Qudwah yang ung-gul dan religius, yang selalu men-dukung bakat siswa, serta kepada pelatih yang sudah membimbing Arya dengan sabar. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi siswa lainnya,” pungkas Yuyun.(ENK)

DKP3 Serang Periksa Produk Hewan di Pasaran

SERANG, BANPOS - Upaya melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman terus dilakukan melalui pengawasan produk pangan, khususnya produk asal hewan, di pusat perbelanjaan. Dalam kegiatan kali ini, pengawasan dilakukan di Super Indo, dengan rencana menyasar dua lokasi, yakni Super Indo dan Lotte Mart.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Serang, Handriyan Mungin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin untuk memastikan produk-produk asal hewan yang beredar dan dijual kepada masyarakat berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi.

“Kita sekarang lagi di Super Indo ini untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, khususnya dari produk-produk hewan yang ada di Super Indo. Kami cek semua produk yang ada di sini. Alhamdulillah, di Super Indo ini semua aman, bagus, dan tidak ada permasalahan,” ujar Mungin, Senin (26/10).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk asal hewan.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan direncanakan berlangsung secara rutin, bahkan diperkirakan dapat dilaksanakan setiap pekan.



“Insyaallah, kalau kami rasa, seminggu sekali kita laksanakan rutin,” katanya. Dilokasi yang sama, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang Imanfaturuhmanal, menje-

laskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pangan secara umum.

“Maksud dan tujuannya supaya masyarakat mengonsumsi pangan yang lebih aman, benar-benar higienis, dan enak dimakannya,” kata Iman.

Ia menambahkan, kegiatan pada hari tersebut direncanakan menyasar dua titik lokasi, yaitu Super Indo dan Lotte Mart. Pelaksanaan pengawasan di kedua lokasi itu diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kualitas dan keamanan produk pangan yang dipasarkan kepada masyarakat.

Terkait frekuensi kegiatan,

Iman menyebut pengawasan keamanan pangan secara umum direncanakan berlangsung dua hingga tiga kali dalam setahun, meskipun jadwalnya masih bersifat tentatif.

“Insyaallah, paling setahun dua atau tiga kali. Jadwalnya masih tentatif,” ungkapnya.

Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan keamanan produk pangan, khususnya produk asal hewan, dapat terus terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat berbelanja dan mengonsumsi produk pangan dengan lebih aman, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran. (ACG/AZM)



200 Warga Terima Bantuan Becak Listrik Presiden

SERANG, BANPOS - Sebanyak 200 warga Kota Serang bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung hidup sebagai pengayuh becak.

Saat ini, para calon penerima manfaat tengah mengikuti pelatihan teknis penggunaan becak listrik di GOR Banjarsari, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (26/10).

Walikota Serang, Budi Rustandi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengayuh becak.

“Ini pelatihan teknis kepada masyarakat Kota Serang yang menerima manfaat terkait becak listrik gratis. Ini adalah program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya,” kata Budi.

Ia menjelaskan, sebanyak 200 unit becak listrik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Serang. Sementara itu, rincian jumlah penerima manfaat di setiap kecamatan masih menunggu data dari dinas terkait.

Budi berharap bantuan tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi para penerima, terutama dalam membantu pekerjaan sehari-hari dan meningkatkan penghasilan mereka.

“Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menaikkan ekonomi warga yang memang fokus di becak,” ujarnya.

Menurut Budi, becak listrik nantinya dapat digunakan di berbagai lokasi, mulai dari kawasan wisata hingga lingkungan perumahan. Penggunaan kendaraan listrik tersebut juga diharapkan mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Meski demikian, ia mengingatkan para penerima agar menjaga dan memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya. Becak listrik tersebut tidak boleh dijual ataupun digadaikan.

“Nanti dievaluasi oleh dinas terkait. Ditanyakan sejauh mana pendapatannya, berapa, karena ini untuk menumbuhkan perekonomian mereka,” jelasnya.

Budi menambahkan, para penerima manfaat juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjaga bantuan tersebut. Pemerintah akan melakukan evaluasi guna memastikan becak listrik benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi penerima.

Terkait aturan operasional becak di Kota Serang, Budi menilai program tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah selama penggunaannya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak beroperasi di jalan protokol.

Bantuan becak listrik tersebut disambut baik oleh para calon penerima manfaat. Mereka berharap bantuan dari Presiden Prabowo Subianto itu dapat meringankan pekerjaan sehari-hari sekaligus membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan pekerjaan kami sehari-hari dan membantu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terimakasih Presiden Prabowo Subianto dan Walikota Serang Budi Rustandi,” ucap salah satu penerima manfaat. (ACG/AZM)

SERANG, BANPOS - Ruang digital berpotensi menjadi lingkungan berisiko bagi anak tanpa pendampingan memadai. Akses internet terbuka membuka ancaman grooming, sextortion, penyebaran konten seksual, hingga eksploitasi seksual daring. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Banten Erminiwati menegaskan edukasi perlindungan diri harus sejak dini.

Ancaman itu tidak cukup dihadapi dengan membatasi gawai. Anak perlu memahami batasan tubuh, kesehatan reproduksi sesuai usia, dan kemampuan mengenali situasi berbahaya. Keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus menciptakan lingkungan aman bagi tumbuh kembang anak.

“Anak harus dikenalkan batasan terlebih dahulu. Kita kadang menganggap alat reproduksi itu tabu dijelaskan, padahal hal dasar seperti bagian mana yang tidak boleh disentuh sudah harus diajarkan sejak dini,” ujar Erminiwati kepada BANPOS, Kamis (22/10).

Erminiwati menegaskan edukasi perlindungan diri harus diberikan sejak dini. Anak perlu memahami bagian tubuh pribadi dan hak menolak sentuhan tidak nyaman. Anak juga perlu berani mencari pertolongan saat menghadapi situasi berisiko.



Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Erminiwati.

Pendidikan kesehatan reproduksi masih kerap dianggap tabu. Pemahaman dasar perlindungan tubuh menjadi bekal anak mengenali ancaman di lingkungan terdekat maupun dunia maya. Literasi digital dibutuhkan agar anak memahami interaksi daring tidak selalu aman.

“Kementerian PPPA dan DP3AKKB sudah bekerja sama dengan Komdigi terkait layanan digital. Kemarin di Gading Serpong ada lokakarya penguatan perlindungan anak di ruang digital ke dalam kebijakan daerah,” katanya.

Pemerintah mendorong kolaborasi memperkuat perlindungan anak di ruang digital. DP3AKKB bersama Kementerian PPPA dan Komdigi mengintegrasikan kebijakan daerah. Lokakarya di Gading Serpong melibatkan perangkat daerah, dinas pendidikan, dan badan perencanaan.

Tanggung jawab perlindungan anak tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Keluarga menjadi lingkungan pertama membangun pemahaman

batasan, keamanan, dan cara menghadapi risiko. Pengawasan keluarga perlu disertai komunikasi terbuka agar anak berani bercerita.

“Peran tidak bisa diserahkan ke sekolah saja, karena anak ada di rumah delapan jam dan butuh pengawasan keluarga,” ujarnya.

Penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pencegahan. Keselamatan korban menjadi prioritas dengan menjaga identitas anak dan pendampingan psikologis, kesehatan, serta hukum. DP3AKKB berkoordinasi dengan UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, dan Dinas Sosial.

Laporan darurat dapat diteruskan melalui layanan SAPA 129 atau kepolisian. Asesmen menentukan kebutuhan dukungan psikologis, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum. Koordinasi berlanjut hingga satu bulan atau lebih sesuai kondisi korban.

“Kadang kalau lagi main hp kita tenang karena anak anteng, tanpa kita sadari memang dia main apa atau akses apa. Agak takut juga,” singkatnya.

Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman tidak nyaman. Pendampingan keluarga, sekolah, dan pemerintah harus berjalan beriringan untuk menjaga anak di ruang digital. Itu kunci utama perlindungan anak. (MYU/AZM)

Indonesia Bidik Peluang Kerja PMI di Portugal

JAKARTA, BANPOS - Peluang Kerja Pekerja Migran di Portugal menjadi fokus pemerintah melalui percepatan penyelesaian MoU dengan Portugal. Kerja sama itu diarahkan membuka sektor perhotelan hingga perikanan sekaligus memperkuat perlindungan hak PMI.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima Presiden Dewan Badan Integrasi, Migrasi, dan Suaka Portugal (AIMA) Pedro Portugal Gaspar di Jakarta, Senin (26/10). Pertemuan itu memperkuat sinergi tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran. Mukhtarudin menyebut hubungan bilateral kedua negara menjadi modal kerja sama

ketenagakerjaan.

“Kementerian P2MI menyampaikan apresiasi kepada AIMA karena telah hadir memenuhi undangan pertemuan ini,” kata Mukhtarudin.

Indonesia memiliki bonus demografi dengan penduduk usia produktif besar, sedangkan Portugal menghadapi penuaan penduduk. Kondisi itu membuka peluang kerja sama saling menguntungkan di sektor ekonomi Portugal. Kerja sama penempatan dikembangkan melalui proyek perintis 30 pekerja migran di perhotelan.

Proyek perintis itu diselaraskan dengan penyelesaian MoU agar penempatan memiliki landasan jelas. Kementerian P2MI bersama AIMA mem-

proses finalisasi MoU penempatan dan perlindungan PMI. Indonesia telah menyampaikan rancangan kesepakatan dan menunggu counter draft dari AIMA.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya di Portugal,” kata Mukhtarudin.

MoU diarahkan tidak hanya memperluas kesempatan kerja, tetapi juga memastikan perlindungan sejak penempatan hingga bekerja. Aspek yang diperhatikan meliputi pengaduan, bantuan hukum, perlindungan sosial, dan repatriasi PMI. Mukhtarudin berharap kesepakatan

dapat ditandatangani pada akhir November 2026.

Pedro menyambut baik dialog untuk membangun kerja sama migrasi legal, aman, dan menghormati HAM. Ia menilai peluang kerja dapat diperluas ke perikanan, pariwisata, dan bidang lain sesuai kebutuhan pasar Portugal. KP2MI mendorong fast track protocol, job matching, serta pelatihan untuk konstruksi, pertanian, dan kesehatan.

“Yang paling utama adalah keamanan pekerja migran Indonesia yang nantinya datang ke Portugal,” ujar Pedro.

KP2MI menyediakan pusat layanan pengaduan dalam dan luar negeri. Layanan telekonseling mendukung kesehatan psikologis pekerja migran. (AZM/RMID)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Rои yang berkedudukan di Jakarta, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I, terhadap jaminan debitor PT REPURTISA JAYA MANDIRI sebagai berikut :

Objek Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1 (satu) bidang tanah seluas 66m2 beserta bangunan dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya sesuai SHM No. 2135 terdaftar atas nama Heni Noviadri yang terletak di Blok E. 26/9 Desa Kutubumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Indah Blok E.26/9 Desa Kutubumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Rp. 381.000.000,-	Rp. 76.200.000,-
1 (satu) bidang tanah seluas 71m2 beserta bangunan dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya sesuai SHM No. 06776 terdaftar atas nama Heni Noviadri yang terletak di Blok E. 36/21 Desa Kutubumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Indah Blok G/321 Desa Kutubumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Rp. 168.000.000,-	Rp. 33.600.000,-

Keterangan

- Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (23.59 WIB)
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Pelaksanaan dan Tata Cara Pelaksanaan :

Hari dan Tanggal	: Selasa, 10 November 2026
Cara Penawaran	: Open Bidding
Alamat Domain	: lelang.go.id
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 10 November 2026 Pukul 10.20 WIB (sesuai waktu server).
Pelunasan Harga Lelang	: Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I Jalan TMP Taruna Kota Tangerang
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli	: 2 % dari harga lelang
PPN Pembeli	: 1 % dari harga terjual lelang dipungut langsung oleh BRI pada saat penyerahan Sertifikat Asli

Pengenaan BPHTB : Pengenaan BPHTB atas Perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Pemda dimana Objek berada.

Syarat-syarat lelang :

1. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
2. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
3. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
4. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
5. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
6. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
7. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
8. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
9. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id
10. Memiliki akun yang telah diverifikasi pada website lelang.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2026

Td

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Kantor Cabang Jakarta Rои

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I melalui Jasa Pira Lelang PT. BALI AUCTION HOUSE terhadap barang jaminan debitor atas nama :

PT. ALDIRA BERKHAH ABAHI MAKMUR (Aldira Group)
Selidang tanah kosong seluas 2.000 m² sesuai dengan SHM No. 2828/Karang Mulya tercatat atas nama RUDY HARTONO ISKANDAR, terletak di Jalan Parang Jaya, Desa/Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

(Harga Limit Rp. 11.060.000.000,- /Uang Jaminan Rp. 4.425.000.000,-)

PERSYARATAN LELANG :

1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Menyetor uang jaminan lelang sebesar nominal yang dipersyaratkan ke rekening Virtual Account (VA) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang
3. Peserta lelang yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
4. Peserta lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang yang dijual apa adanya (kondisi "as is"). Peserta lelang yang wanprestasi uang jaminannya akan disetor seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak setelah penunjukannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pejabat lelang
5. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Bali Auction House, dan/atau KPKNL Tangerang I
6. Seluruh biaya pasca lelang, tanggapan pajak berikut denda-dendanya serta pajak/biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya, antara lain namun tidak terbatas pada PPH, PPN, maupun pajak lainnya
7. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
8. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025 Pasal 18, Pemegang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1%, yang wajib disetorkan ke rekening penampung PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selambat-lambatnya sampai dengan saat pengambilan dokumen sergipakit agunan
9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website lelang.go.id

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

1 Cara Penawaran	: Open Bidding
2 Pelaksanaan Lelang	: Selasa, 10 November 2026
3 Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
4 Batas Akhir Penawaran	: 10 November 2026, pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
5 Alamat Domain	: lelang.go.id
6 Tempat Pelaksanaan Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang I Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang
7 Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran
8 Pelunasan Harga Lelang	: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
9 Bea Lelang Pembeli	: 2% dari harga lelang
10 Informasi Lebih Lanjut	: PT. Bali Auction House Telp. (021) 38825216 / 0819 2912912/0813 8777 8373

Jakarta, 27 Oktober 2026

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Corporate Remedial & Recovery

TTD PEMOHON

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDIURAN
Jl. Ustadz Uzair Yachya Nomor 1, Serang, Banten, 42117, Telepon (0254) 206111, Surel bbwsc_3@pu.go.id

PENGUMUMAN PENGUSULAN LOKASI PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR (IRIGASI (P3-TGA)) TAHUN ANGGARAN 2027
Nomor: 5/PENG/BWS3/2026

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGA) merupakan program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN. Pelaksanaan P3-TGA dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P3-TGA.

Pengusulan lokasi P3-TGA berasal dari DPR RI, Instansi Pemerintah Daerah (Dinas PU Provinsi, Kabupaten/ Kota), dan masyarakat Perkumpulan Petani Pemakai Air (PP3A) / Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) / Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

Pendaftaran dilakukan secara online/aplikasi melalui Web Portal Kementerian PU dengan alamat <https://pu.go.id/bantuanpemerintah>, atau <https://p3tgai.pu.go.id/ulusan/>, dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tahap	Mulai	Sampai
Pengusulan lokasi TA. 2027	26 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB	30 November 2026, pukul 16.00 WIB
Evaluasi, Verifikasi Administrasi dan Validasi Usulan Lokasi	26 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB	7 Desember 2026, pukul 16.00 WIB

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sarang, 26 Oktober 2026

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Ciduran

Dedi Yulha Lesmana

Meninggikan kementerian sumber daya air yang berkeadilan



KOMDIGI

MENYAPA NUSANTARA



SELASA, 27 OKTOBER 2026 | BANTEN POS | HALAMAN 12

Program E50 Diperkirakan Butuh 320 Pabrik Etanol

JAKARTA, BANPOS - Program pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol 50 persen atau E50 berpotensi membuka 320 pabrik etanol baru di dalam negeri, sebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikisaintek) Brian Yuliarto.

"Untuk kebutuhan E50, kita perlu mendirikan pabrik etanol sebanyak 320 unit, masing-masing berkapasitas 60 ribu kiloliter," kata Brian dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut dia, pengembangan industri etanol menjadi salah satu peluang untuk mengalihkan belanja impor energi menjadi aktivitas industri di dalam negeri.

Ia mengatakan Indonesia selama ini mengeluarkan sekitar 30 miliar hingga 50 miliar dolar AS untuk impor energi. Ia menilai program E50 dan B50 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.

Brian menekankan penguatan industri perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Perguruan tinggi, menurut dia, dapat berkontribusi melalui riset, pengem-



Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan sambutan pada pembukaan Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

bangun teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

Ia mengatakan perguruan tinggi juga terbuka untuk menerima penugasan dari industri maupun Danantara guna mendukung pengembangan sektor industri melalui riset dan diseminasi pengetahuan.

"Kita jangan khawatir dengan regulasi-regulasi yang ada. Bukan berarti kita menabrak regulasi, tetapi kita bisa melakukan deregulasi,

penyusunan regulasi yang baru, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Brian, penyesuaian regulasi yang diperlukan dapat mendukung kolaborasi tersebut agar hasil riset perguruan tinggi lebih mudah dimanfaatkan oleh industri.

Ia menilai sinergi riset, industri, dan kebijakan menjadi penting untuk memperkuat industrialisasi nasional dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.(ANT)



Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepasliarkan orangutan Kalimantan yang diselamatkan dari kebun sawit di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Sabtu (24/10).



Membuka Kabut Digital di Papua Pegunungan

BENTANG Pegunungan Jayawijaya menjadi tantangan pemerataan konektivitas dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia Timur. Berbeda dengan wilayah pegunungan di Pulau Jawa yang telah ditunjang jaringan jalan dan infrastruktur memadai, tantangan aksesibilitas wilayah di Papua Pegunungan menyebabkan pembangunan jaringan telekomunikasi di sana membutuhkan biaya lebih besar dan waktu lebih panjang.

Foto dan Teks : Bayu Pratama S
Editor : Puspa Perwitasari

Material pembangunan seperti tower Base Transceiver Station (BTS), perangkat jaringan, hingga genset harus diangkut menggunakan pesawat perintis atau helikopter untuk menjangkau distrik-distrik terpencil. Bahkan, cuaca ekstrem, kabut tebal, dan longsor juga kerap menghambat proses pembangunan maupun pemeliharaan jaringan.

Sementara itu, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, penetrasi internet nasional atau persentase penduduk yang memiliki akses internet di Indonesia mencapai 80,66 persen. Namun tingkat penetrasi internet di Maluku dan Papua masih berada di angka sekitar 69,26 persen

sehingga kesenjangan konektivitas antarwilayah masih terlihat.

Kesenjangan digital tersebut tak bisa terus dibiarkan terjadi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Pegunungan, dari dunia luar. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya membukanya dengan peningkatan sejumlah fasilitas penunjang di sana.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Wamena menjadi salah satu upaya memperkuat layanan internet di Papua Pegunungan. Sejak 2019, kapasitas jaringan internet di Papua Pegunungan meningkat bertahap dari 7,6 gigabites per second (gbps) hingga pada 2026 mencapai 40 gbps. Peningkatan sejauh itu bisa dicapai



setelah dilakukan pengembangan infrastruktur Community Gateway Wamena dengan konektivitas berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO). Sistem tersebut juga meningkatkan proses pengiriman data dari perangkat pengguna seperti gawai, komputer,

dan router hingga 30 persen.

Wilayah yang sebelumnya terisolasi kini mulai terhubung melalui jaringan telekomunikasi berbasis satelit maupun infrastruktur pendukung lainnya. Kehadiran fasilitas telekomunikasi di kawasan pegunungan

menjadi penghubung penting bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup jauh dari akses informasi dan layanan digital.

Warga mulai memanfaatkan gawai untuk berkomunikasi, mengakses informasi, hingga mendukung akti-

vitasi ekonomi dan pendidikan. Wilayah di Lembah Baliem yang dikelilingi Pegunungan Jayawijaya seakan tidak lagi menjadi penghalang bagi warga setempat untuk terhubung ke seluruh penjuru dunia.

"Dulu kami susah berkomunikasi dengan keluarga di luar Wamena karena sinyal sering hilang dan akses internet terbatas. Namun sekarang jaringan sudah lebih baik sehingga kami lebih mudah menelepon, mengirim pesan, bahkan bisa melakukan siaran langsung untuk mengenalkan daerah kami," kata warga Wamena, Yewor (39).

Yewor tidak sendiri. Kini jumlah rumah tangga yang mengakses internet di Papua pegunungan semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pada 2024 jumlahnya 12,15 persen dan meningkat hingga akhir 2025 menjadi 26,61 persen rumah tangga yang ada di provinsi itu.

Pertumbuhan angka tersebut pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan perekonomiannya. BPS merilis ekonomi Papua Pegunungan pada Triwulan I 2026 secara year on year tumbuh 3,51 persen dibanding periode yang sama pada 2025.

Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia Timur bukan sekadar menghadirkan sinyal komunikasi, melainkan juga membuka harapan baru tentang kesetaraan akses dan masa depan masyarakat Papua Pegunungan. (***)

